



STATISTIK POTENSI DESA PROVINSI DKI JAKARTA

*VILLAGE POTENTIAL STATISTICS OF PROVINCE
OF DKI JAKARTA*

2014





STATISTIK POTENSI DESA PROVINSI DKI JAKARTA

*VILLAGE POTENTIAL STATISTICS OF PROVINCE
OF DKI JAKARTA*

2014



STATISTIK POTENSI DESA PROVINSI DKI JAKARTA 2014

No. ISBN : 978-979-064-755-8
No. Publikasi : 04310.1513.31
Katalog BPS : 1105014.31
Ukuran Buku : 21,59 cm X 27,94 cm
Jumlah Halaman : 65 + ii halaman

Naskah : Bidang Sosial
BPS Provinsi DKI Jakarta

Tim Penyusun

Penanggungjawab : Nyoto Widodo
Editor Penanggung Jawab : Sri Santo Budi Muliatinah
Tim Penulis : Siti Alifah
Rini Apsari
Robert Ronytua Pardosi
Tri Pramujiyanti
Nurhayati
Nunung Dwisyahesti
Lay Out Publikasi : Bidang IPDS
Gambar Kulit : Bidang IPDS
Diterbitkan oleh : BPS Provinsi DKI Jakarta

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Kata Pengantar

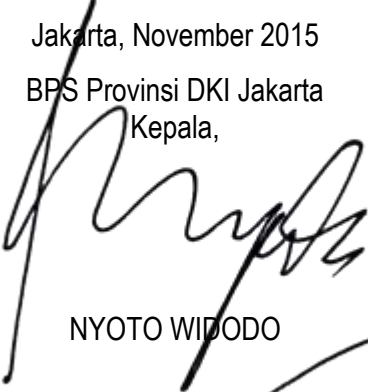
Publikasi Statistik Potensi Desa 2014 BPS Provinsi DKI Jakarta merupakan publikasi pertama kali yang diterbitkan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta. Publikasi ini menyajikan data keberadaan yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Antara lain Kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan hidup,antisipasi dan kejadian bencana alam, pendidikan dan kesehatan, sosial dan budaya, hiburan dan olahraga, angkutan, komunikasi dan informasi, ekonomi, keamanan, pemberdayaan masyarakat, serta keterangan pemerintahan kelurahan.

Data dalam publikasi ini disajikan dalam bentuk tabel dan grafik tanpa klasifikasi perkotaan atau pedesaan karena di wilayah administrasi pemerintahan terkecil di Provinsi DKI Jakarta termasuk klasifikasi perkotaan.

Publikasi ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi kelurahan bagi para pemakai data. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi diberikan kepada semua pihak yang memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Kritik konstruktif dan saran perbaikan bagi publikasi serupa di masa mendatang sangat kami harapkan.

Jakarta, November 2015

BPS Provinsi DKI Jakarta
Kepala,



NYOTO WIDODO

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I. KETERANGAN UMUM KELURAHAN.....	1
BAB II. KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	7
BAB III. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	10
3.1. Perumahan.....	10
3.1.1. Sumber Penerangan.....	10
3.1.2. Bahan bakar untuk memasak.....	11
3.1.3. Tempat pembuangan sampah dan ketersediaan tempat penampungan sampah sementara	12
3.1.3. Tempat Buang Air Besar Keluarga.....	13
3.2. Sungai, saluran irigasi, dan danau/waduk/situ/bendungan	13
BAB IV. ANTISIPASI DAN KEJADIAN BENCANA ALAM	20
BAB V. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN.....	7
5.1 Pendidikan.....	25
5.2 Kesehatan.....	30
BAB VI. SOSIAL DAN BUDAYA.....	34
BAB VII. HIBURAN DAN OLAH RAGA	40
BAB VIII. ANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI.....	44
8.1 Angkutan	44
8.2 Komunikasi	46
BAB IX. EKONOMI.....	44
BAB X. KEAMANAN.....	50
BAB XI. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	54
11.1. Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Jenisnya	55
11.2. Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Sumber Dana Yang Digunakan.	58
BAB XII. KETERANGAN PEMERINTAH KELURAHAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I. KETERANGAN UMUM KELURAHAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus yang meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk Aceh, Papua, dan Papua Barat.

Provinsi DKI Jakarta terbagi dalam enam kabupaten/kota dan 44 kecamatan. Berdasarkan klasifikasi pemerintahan, di Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat desa tetapi seluruhnya sudah merupakan kelurahan yang jumlahnya mencapai 267 kelurahan. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Ada juga yang menyebut kelurahan adalah bentuk kesatuan administratif dan lurah adalah kepala administratif. (Daldjoeni;1998). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan adalah suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota di bawah kecamatan.

Tabel 1. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2014

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kepulauan Seribu	2	6
Jakarta Selatan	10	65
Jakarta Timur	10	65
Jakarta Pusat	8	44
Jakarta Barat	8	56
Jakarta Utara	6	31
DKI Jakarta	44	267

Sumber : Podes 2014

Kota Jakarta Timur dan Jakarta Selatan masing-masing mempunyai 10 kecamatan dengan 65 kelurahan, sedangkan Kota Jakarta Barat mempunyai 56 kelurahan yang tergabung dalam 8 kecamatan. Sebanyak 44 kelurahan di Kota Jakarta Pusat tergabung dalam 8 kecamatan, sedangkan Kota Jakarta Utara mempunyai 6 kecamatan dengan 31 kelurahan di bawahnya. Kabupaten Kepulauan Seribu awalnya merupakan salah satu kecamatan di Kota Jakarta Utara, dan dalam perkembangannya terbentuk menjadi kabupaten melalui peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Hanya ada dua kecamatan di Kabupaten Kepulauan Seribu dengan 6 kelurahan di bawahnya.

Kepala kelurahan atau lurah menempati kantor lurah. Kantor lurah merupakan bangunan aset kelurahan yang diperuntukkan secara khusus untuk kegiatan operasional pemerintahan kelurahan yang tidak dimiliki oleh pribadi. Hasil Podes 2014 menunjukkan setiap kelurahan di Provinsi DKI Jakarta telah mempunyai kantor kelurahan yang berlokasi di wilayah kelurahan yang bersangkutan. Dengan demikian sangat mudah bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan karena tidak harus pergi keluar kelurahan tempat tinggalnya.

Topografi adalah keadaan muka bumi pada suatu kawasan atau daerah. Topografi suatu wilayah dibedakan menjadi empat macam :

- a. Puncak adalah bagian paling atas gunung/pegunungan.
- b. Lereng adalah bagian dari gunung/pegunungan/bukit yang letaknya di antara puncak sampai lembah.
- c. Lembah adalah daerah rendah di antara dua gunung/pegunungan atau daerah yang mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Lembah di daerah pegunungan lipatan sering disebut sinklin. Lembah di daerah pegunungan patahan disebut graben atau slenk. Sedangkan lembah di daerah yang bergunung-gunung disebut lembar antar pegunungan.
- d. Dataran adalah bagian atau sisi bidang tanah yang tampak datar, rata, dan membentang.

Berdasarkan keadaan topografinya, Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata +7 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Bujur Timur. Seluruh kelurahan di DKI Jakarta mempunyai topografi dataran.

Berdasarkan lokasinya terhadap laut suatu wilayah dibagi menjadi dua macam yaitu kelurahan yang berada di tepi laut dan bukan tepi laut. Kelurahan disebut berada di tepi laut jika sebagian atau seluruh wilayahnya bersinggungan langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang.

Hasil Podes 2014 menunjukkan bahwa di Provinsi DKI Jakarta terdapat 16 kelurahan (5,99 persen) yang berada di tepi laut, atau berbatasan dengan laut. Sementara itu sebanyak 251 kelurahan (94,01 persen) terletak bukan di tepi laut. Seluruh kelurahan atau sebanyak 6 kelurahan, di Kabupaten Kepulauan Seribu berada di tepi laut. Di Kota Jakarta Utara, yang membentang dari Marunda sampai Kamal Muara sepanjang garis pantai, terdapat 10 kelurahan yang berada di tepi laut. Sedangkan di 4 kota lainnya tidak ada kelurahan yang berada di tepi laut.

Tabel 2. Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Lokasi Kelurahan Terhadap Laut, 2014

Kabupaten/Kota	Tepi Laut	Bukan Tepi Laut	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	6	0	6
Jakarta Selatan	0	65	65
Jakarta Timur	0	65	65
Jakarta Pusat	0	44	44
Jakarta Barat	0	56	56
Jakarta Utara	10	21	31
DKI Jakarta	16	251	267

Sumber : Podes 2014

Salah satu ciri wilayah yang berbatasan dengan laut adalah terdapatnya hutan mangrove atau hutan bakau yang berada di pinggir pantai. Hutan Mangrove ini sangat besar manfaatnya, antara lain sebagai habitat satwa langka, pelindung bencana, pengendapan lumpur, penambat racun, penambah unsur hara, sumber plasma nutfah, penyerap karbon, dan lain sebagainya. Selain itu hutan bakau juga dapat digunakan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata. Di Provinsi DKI Jakarta hutan bakau yang dikembangkan menjadi obyek wisata terdapat di Kelurahan Muara Angke Jakarta Utara. Berdasarkan data Podes 2014, di Provinsi DKI Jakarta terdapat 9 kelurahan yang mempunyai hutan bakau, 5 diantaranya terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu, dan 4 kelurahan terdapat di Kota Jakarta Utara.

Podes 2014 selain menghitung jumlah kelurahan yang berada di tepi laut atau bukan tepi laut, juga menghitung lokasinya terhadap hutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hasil Podes

2014 menunjukkan seluruh wilayah kelurahan di DKI Jakarta berada di luar hutan, artinya seluruh wilayah kelurahan tidak berbatasan langsung dengan hutan. Hutan yang ada di Provinsi DKI Jakarta berupa hutan kota, yang dianggap bukan hutan dalam pendataan Podes 2014. Hutan kota sendiri banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta, bahkan menurut Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, jumlahnya mencapai 59 titik dengan luas total mencapai 644,38 ha. Hutan tersebut dimiliki dan dikelola oleh instansi pemerintah, swasta, komunitas, maupun perorangan.

Gambar 1. Hutan Kota di DKI Jakarta



Sumber : Jurnal Bumi.com

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2007, Provinsi DKI Jakarta mempunyai luas wilayah 662,33 Km². Dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 sebesar 10.075,3 ribu orang dan kepadatan penduduk di DKI Jakarta pada tahun 2014 mencapai 15.234 penduduk/Km². Sebagai kota metropolitan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian lahan di DKI Jakarta tidak banyak digunakan untuk sektor pertanian. Penggunaan lahan sektor pertanian yang meliputi penggunaan lahan sawah dan lahan kering (tegalan) merupakan jenis penggunaan lahan yang paling kecil.

Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan semakin tinggi pemenuhan kebutuhan lahan, seperti untuk perumahan, infrastruktur, dan fasilitas pembangunan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut banyak dilakukan pembangunan tempat tinggal berupa perumahan maupun apartemen. Selain itu kebutuhan lahan diperlukan untuk pusat bisnis dan perkantoran. Hal tersebut menyebabkan terjadinya alih

fungsi lahan di DKI Jakarta, yang merupakan perubahan fungsi dari lahan pertanian sawah dan pertanian non sawah.

Tabel 3. Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Perubahan Penggunaan Lahan Selama Setahun Terakhir, 2014

Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Sawah Menjadi		Lahan Pertanian Non sawah menjadi Lahan Non Pertanian
	Lahan Pertanian Non Sawah	Lahan Non Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	0	0	0
Jakarta Selatan	0	1	1
Jakarta Timur	1	4	7
Jakarta Pusat	0	0	0
Jakarta Barat	0	0	1
Jakarta Utara	0	1	1
DKI Jakarta	1	6	10

Sumber : Podes 2014

Hasil Podes 2014 menunjukkan telah terjadi perubahan penggunaan dari lahan pertanian sawah menjadi lahan pertanian non sawah di 1 kelurahan dan menjadi lahan non pertanian di 6 kelurahan. Perubahan dari lahan pertanian sawah menjadi lahan non sawah terjadi di Jakarta Timur, sedangkan menjadi lahan non pertanian terjadi di Jakarta Selatan (1 kelurahan), Jakarta Timur (4 kelurahan), dan Jakarta Utara (1 kelurahan). Sementara itu, perubahan penggunaan lahan pertanian non sawah menjadi lahan non pertanian terjadi di 10 kelurahan. Di Kota Jakarta Timur terdapat 7 kelurahan, dan di Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Utara, masing-masing terdapat perubahan di satu kelurahan. Secara keseluruhan, Kota Jakarta Timur paling banyak terdapat kelurahan yang mengalami alih fungsi lahan dengan total seluruhnya sebanyak 12 kelurahan.

Di Provinsi DKI Jakarta terdapat Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan. Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) merupakan lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan yang bertujuan untuk membantu Lurah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian setiap kelurahan di DKI Jakarta telah mempunyai LMK, sesuai dengan data Podes 2014. Secara umum LMK ini mempunyai tugas menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat kepada Lurah, memberikan masukan dalam rangka meningkatkan partisipasi, menggali potensi untuk menggerakkan dan mendorong peran serta masyarakat, dan lain sebagainya.

<http://jakarta.bps.go.id>

BAB II. KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

Pada dasarnya setiap daerah memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Untuk melihat hal tersebut masyarakat harus bisa melihat atau mencari potensi-potensi, berupa sumber daya yang ada dan pengetahuan untuk dapat mengelola sumber daya tersebut.

Menurut Hasil Potensi Desa (PODES) pada tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa penghasilan utama sebagian besar penduduk di kelurahan didominasi oleh 3 sektor utama yaitu sektor Jasa (43,07 persen atau 115 kelurahan), sektor perdagangan besar/eceran dan rumah makan (39,70 persen atau 105 kelurahan) dan sektor Industri Pengolahan (13,11 persen atau 35 kelurahan). Menurut wilayah di DKI Jakarta terlihat hanya di kepulauan Seribu yang seluruh kelurahannya sebagian besar masyarakatnya mempunyai penghasilan utama di sektor pertanian.

Di DKI Jakarta dapat terlihat bahwa karakteristik masyarakat di Jakarta Selatan, 29 persen kelurahannya memiliki masyarakat yang sebagian besar mempunyai penghasilan di sektor perdagangan besar/eceran dan rumah makan, dan 69 persen kelurahannya memiliki masyarakat yang sebagian besar mempunyai penghasilan di sektor Jasa yang meliputi : pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan, serta pemerintahan dan perorangan.

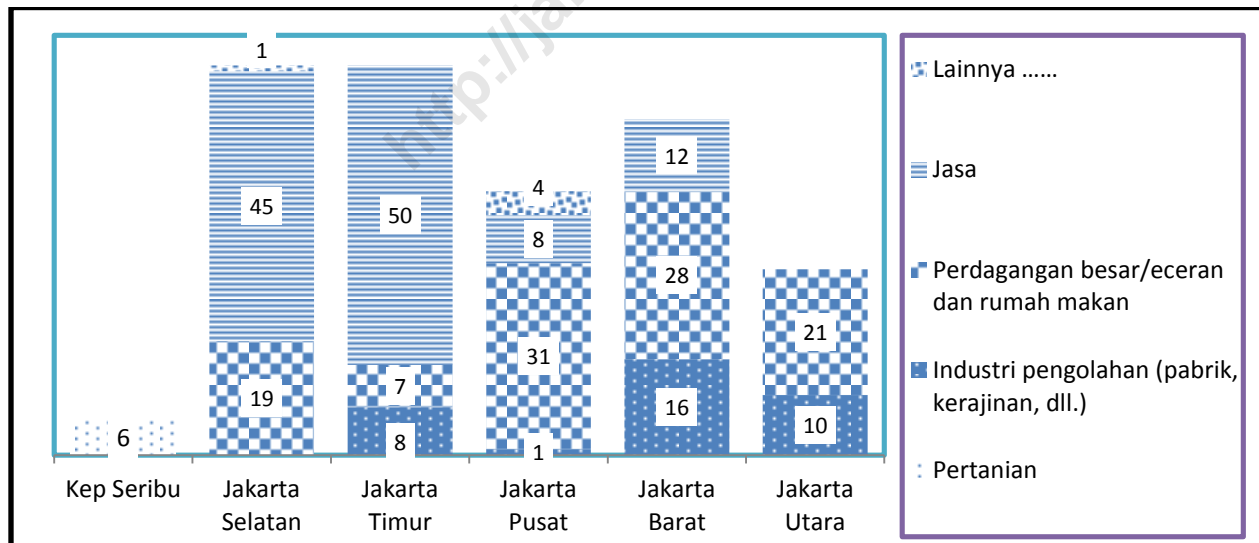
Sedangkan untuk wilayah di Jakarta Timur menunjukkan 11 persen kelurahannya mempunyai masyarakat yang sebagian besar berpenghasilan bersumber pada sektor perdagangan besar/eceran dan rumah makan, 77 persen kelurahannya mempunyai masyarakat yang sebagian besar berpenghasilan bersumber pada sektor jasa dan 12 persen kelurahannya memiliki masyarakat yang berpenghasilan utama di sektor Industri pengolahan. Potensi wilayah di Jakarta Timur terlihat di banyak lokasi seperti Kawasan Industri Pulogadung, Kawasan Jatinegara sebagai pusat perdagangan besar dan eceran, Kawasan Mebel di Klender, serta pasar-pasar yang mempunyai keunikan khusus seperti pasar kramat Jati sebagai pusat perdagangan sayur-sayuran dan buah-buahan serta pasar prumpung yang lebih banyak memperdagangkan mainan anak-anak.

Wilayah Jakarta Pusat juga memiliki karakteristik potensi ekonomi yang berbeda dibandingkan wilayah lain, 71 persen kelurahan di wilayah tersebut memiliki masyarakat yang sebagian besar berpenghasilan utama dari sektor perdagangan besar/eceran dan rumah makan, sedangkan 18 persen kelurahan memiliki masyarakat yang sebagian besar berpenghasilan utama dari sektor jasa dan di sektor lainnya (9 persen) dan sektor industri pengolahan (3 persen). Kawasan bisnis di Jakarta Pusat sebagai

pusat perdagangan besar/eceran seperti Kawasan Senen, Pasar Baru, Tanah Abang, atau pasar-pasar yang mempunyai keunikan khusus seperti pasar mobil di Kemayoran atau Pusat perdagangan emas di Cikini, dll. Selain itu sektor jasa juga banyak terdapat di Jakarta Pusat, karena wilayah ini banyak terdapat kantor pemerintahan sebagai pusat pemerintahan, dan hotel-hotel serta sektor-sektor lain seperti sekolah dll.

Di Jakarta Barat menunjukkan 50 persen kelurahannya memiliki masyarakat yang sebagian besar mempunyai penghasilan di sektor perdagangan besar/eceran, rumah makan, 29 persen kelurahan masyarakatnya sebagian besar berpenghasilan di sektor industri pengolahan dan 21 persen kelurahan masyarakatnya sebagian besar berpenghasilan di sektor Jasa-Jasa. Rencana pengembangan Kawasan prioritas di Jakarta Barat menunjukkan bahwa Kawasan Glodok-Pancoran sebagai pusat perdagangan elektronik, Kawasan kota tua sebagai pusat pariwisata, kawasan sentra bunga Rawa Belong sebagai pusat promosi dan pemasaran hasil hutan serta pertanian, kawasan Rawa Buaya sebagai sentra UKM dan kawasan Grogol-Tanjung Duren sebagai pusat pendidikan, perdagangan, perkantoran, wisata belanja dan jasa.

Gambar 2.1. Jumlah Kelurahan Menurut Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk DKI Jakarta, 2014



Sumber : Podes 2014

Jakarta Utara memiliki fasilitas pelabuhan seperti pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Sunda Kelapa, hal ini membuat wilayah tersebut menjadi tempat aktivitas ekspor dan impor komoditas-komoditas ekonomi, dan Kawasan berikat Nusantara (KBN) di Cakung, Kawasan-kawasan perdagangan seperti kelapa Gading, Mangga Dua, Glodok dan Pluit membuat sebagian besar masyarakat di wilayah Jakarta

utara berpenghasilan utama di sektor perdagangan, rumah makan dan sektor industri pengolahan. Banyaknya wilayah-wilayah strategis itu membuat 68 persen kelurahan di Jakarta Utara memiliki masyarakat yang sebagian besar berpenghasilan utama dari sektor perdagangan besar/eceran dan rumah makan dan 32 persen kelurahan memiliki masyarakat yang sebagian besar di sektor industri pengolahan.

Tantangan yang dihadapi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan yang mempunyai sarana dan prasarana lengkap membuat daya tarik tersendiri untuk para pendatang baru dari daerah lain untuk masuk ke DKI Jakarta, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Banyak hal yang dapat ditimbulkan oleh para pendatang baru, khususnya dalam rangka penyediaan lapangan pekerjaan. Banyaknya pendatang baru yang memiliki pendidikan dan kemampuan terbatas membuat mereka tidak dapat tertampung di sektor-sektor formal sehingga mereka harus bekerja di sektor non formal yang biasanya banyak bergerak di sektor jasa serta sektor perdagangan besar/eceran dan rumah makan. Sehingga tantangan yang dihadapi DKI Jakarta adalah bagaimana DKI Jakarta dapat meningkatkan kesempatan kerja khususnya di sektor-sektor formal yang biasanya mengindikasikan pendapatan atau kesejahteraan yang lebih baik dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

BAB III. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

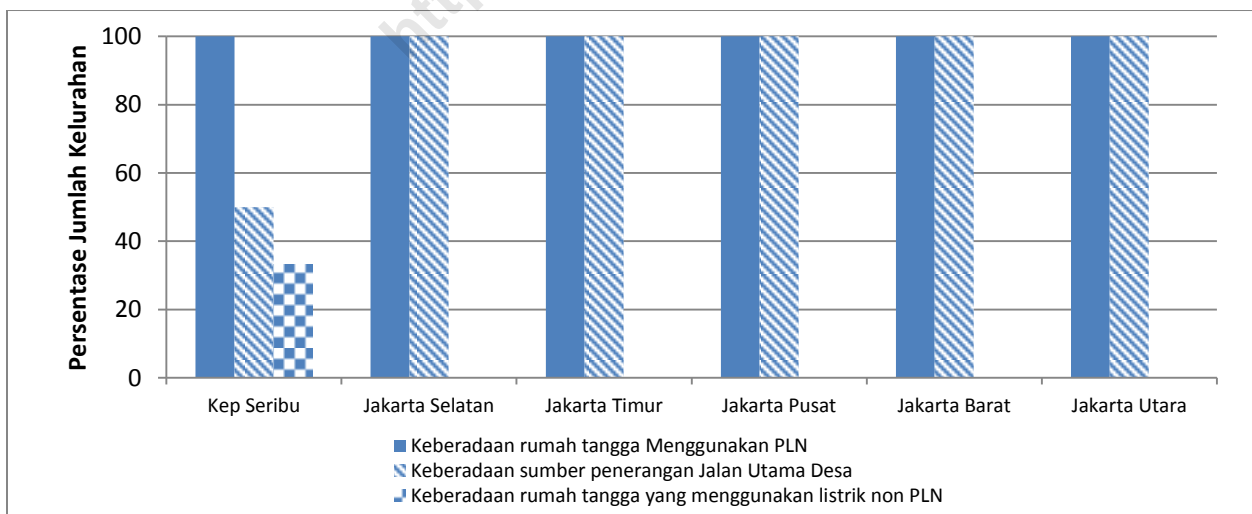
3.1. Perumahan

3.1.1. Sumber Penerangan

Listrik adalah teknologi yang dapat membantu kelancaran bentuk kegiatan masyarakat. Manfaat listrik untuk kehidupan adalah sebagai sumber penerangan, sumber energi, penghasil panas, penghasil gerak dan dapat juga menjadi sarana hiburan. Begitu banyak manfaat listrik yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ketidakhadiran fasilitas listrik dapat membuat seluruh aktifitas manusia tidak dapat berjalan secara maksimal.

PLN menurut UU no 30 tahun 2009 adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum. DKI Jakarta sebagai kota metropolitan dan juga sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, sangat membutuhkan energi listrik untuk mendukung aktifitas tersebut. Beban listrik di DKI Jakarta tiap waktu terus bertambah seiring dengan berkembangnya pembangunan berbagai sektor di DKI Jakarta. Sistem kelistrikan di DKI Jakarta saat ini dipasok dari 11 titik, dengan 3 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yaitu PLTU Priok, PLTU Muara Karang dan PLTU Lontar Teluk Naga.

Gambar 3.1. Persentase Kelurahan Yang memiliki listrik PLN, Listrik Non PLN dan Penerangan Jalan Utama Desa Menurut Wilayah, DKI Jakarta, 2014



Sumber : Podes 2014

Menurut Hasil Potensi Desa tahun 2014 menunjukkan bahwa sudah semua kelurahan di DKI Jakarta menikmati fasilitas Listrik dengan sumber PLN. Hanya saja ada beberapa wilayah yang

kekurangan pasokan listrik sehingga harus menggunakan listrik dengan sumber non PLN. Kelurahan Pulau Tidung dan Pulau Harapan ada beberapa rumah tangga yang menggunakan listrik non PLN sebagai sumber energi untuk membantu kelancaran kegiatannya (Gambar 3.1).

Hal yang menjadi tantangan bagi DKI Jakarta dalam Listrik adalah penyediaan ketersediaan listrik. Ketersediaan listrik yang dapat menjadi sumber energi menjadi satu hal yang harus disiapkan untuk mengundang investor agar mau menanamkan modal di DKI Jakarta. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, Haris Pindratno, kebutuhan listrik di DKI Jakarta mencapai 7,5 gigawatt per hari, tetapi ternyata jumlah tersebut masih kurang untuk memenuhi kebutuhan terhadap perkembangan kota.

3.1.2. Bahan bakar untuk memasak

Salah satu pertanyaan pada Potensi Desa adalah melihat pemakaian bahan bakar untuk memasak sebagian besar rumah tangga di suatu wilayah kelurahan/desa. Dalam pertanyaan ini dibedakan menjadi gas kota, LPG, minyak tanah, kayu bakar dan lainnya. Berdasarkan hasil potensi desa tahun 2014 menunjukkan bahwa semua kelurahan (267 kelurahan) di wilayah DKI Jakarta, masyarakatnya sebagian besar sudah menggunakan bahan bakar LPG sebagai bahan bakar untuk memasak (Gambar 3.2). Hal tersebut dianjurkan karena salah satu kebijakan dalam reformasi Energi Nasional adalah diversifikasi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, khususnya minyak tanah. Sehingga untuk rumah tangga yang memakai bahan bakar minyak tanah dialihkan ke LPG. Minyak tanah adalah salah satu bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah. Pengalihan minyak tanah ke LPG karena LPG mempunyai keuntungan:

- a. mudah digunakan dan dipindahkan,
- b. bersih dan ramah lingkungan,
- c. pembakaran mudah disesuaikan,
- d. temperatur panas yang tinggi dan berbau khas,
- e. pemakaian yang lebih mudah karena tidak harus dipanaskan terlebih dahulu,
- f. dan LPG mempunyai pembakaran yang lebih sempurna.

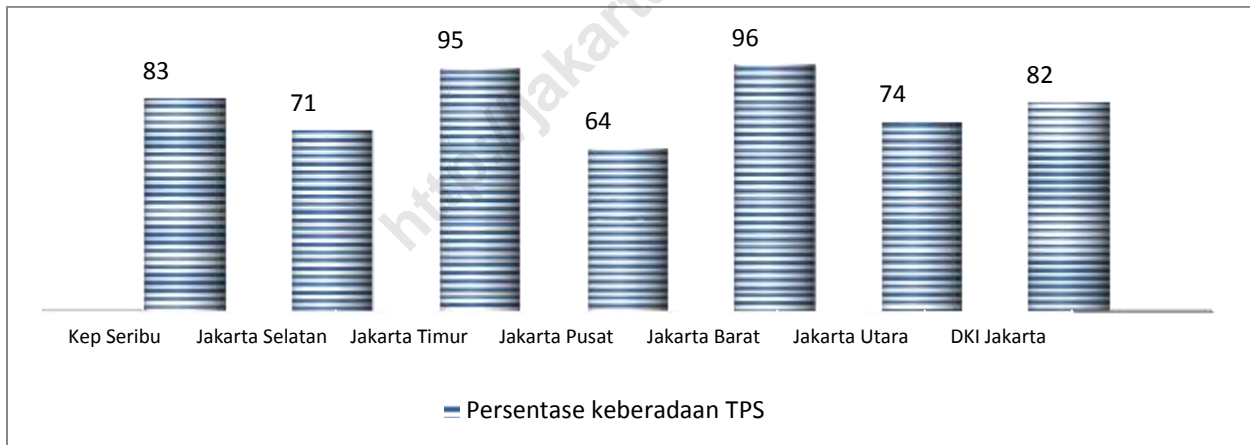
Masalah dalam pengalihan bahan bakar minyak tanah ke LPG adalah ketersediaan pasokan bahan bakar LPG untuk masyarakat di DKI Jakarta. Berdasarkan Hasil Potensi Desa tahun 2014 menunjukkan bahwa semua kelurahan (267) terdapat agen bahan bakar LPG. Agen gas LPG berfungsi menyediakan, mendistribusikan, mengangkut, dan melayani kebutuhan gas elpiji untuk umum. Keberadaan

agen bahan bakar LPG di seluruh wilayah kelurahan di DKI Jakarta menandakan semua wilayah sudah mempunyai tempat menyimpan pasokan untuk bahan bakar LPG.

3.1.3. Tempat pembuangan sampah dan ketersediaan tempat penampungan sampah sementara.

Tempat pembuangan sampah dalam Pendataan Potensi Desa (PODES) mencakup pada 2 hal yaitu tempat yang digunakan dan cara yang dilakukan untuk penanganan sampah. Sehingga ada 4 kriteria tempat pembuangan sampah yang diteliti yaitu (i) dikumpulkan di tempat sampah kemudian diangkut; (ii) dikumpulkan di lubang lalu dibakar; (iii) langsung dibuang ke sungai/aliran irigasi dan (iv) lainnya selain ketiga kriteria di atas seperti dibuang ke got, drainase, selokan, dsb. Hasil PODES tahun 2014 menunjukkan bahwa 266 kelurahan di DKI Jakarta sebagian masyarakatnya menggunakan metode pembuangan sampah dikumpulkan kemudian diangkut oleh petugas, sedangkan 1 kelurahan di Kepulauan Seribu masyarakatnya menggunakan metode dikumpulkan di dalam lubang kemudian dibakar.

Gambar 3.2. Persentase Jumlah Kelurahan menurut Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah dan Keberadaan TPS Menurut Wilayah, DKI Jakarta, 2014



Sumber : Podes 2014

Keberadaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) adalah salah satu elemen dalam pengelolaan sampah di seluruh DKI Jakarta. TPS di DKI Jakarta sebagai tempat penampungan sampah dari rumah tangga sebelum diangkut ke tempat penampungan akhir (TPA). Gambar 3.2. menunjukkan bahwa keberadaan TPS di DKI Jakarta terdapat di 218 kelurahan (81,6 persen), sedangkan sisanya 49 kelurahan (18,35 persen) tidak memiliki TPS. Keberadaan TPS terkadang sulit diterima oleh masyarakat sekitar karena mengganggu kenyamanan warga yang tinggal di sekitarnya. Dampak seperti bau yang tidak sedap, faktor kebersihan dan mikroorganisme yang muncul seperti jamur dan bakteri dapat menimbulkan

penyakit. Hal ini yang menyebabkan masyarakat terkadang menolak keberadaan TPS di wilayahnya. Namun keberadaan TPS sangat dibutuhkan agar penumpukan sampah terkumpul dan tidak tersebar kemana-mana.

Pengelolaan sampah di DKI Jakarta rencananya tidak lagi hanya membuang sampah secara fisik yaitu mengumpulkan sampah di TPS kemudian langsung diangkut ke TPST Bantar Gebang. Fokus pengelolaan sampah di DKI Jakarta direncanakan dengan mengembangkan *Intermediate Treatment Facility* (ITF) dengan sentra 3R yaitu *Reduce, Reuse dan Recycle*. Tujuan dari metode ini adalah mengubah sampah menjadi sesuatu yang berguna dan tentunya dapat mengurangi beban jumlah sampah di Tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang. Saat ini DKI Jakarta memiliki 3 ITF yaitu ITF Sunter, ITF Cakung-Cilincing, dan ITF Marunda.

3.1.3. Tempat Buang Air Besar Keluarga

Buang air besar merupakan bagian yang penting dari ilmu perilaku dan kesehatan masyarakat. Pembuangan tinja bisa menimbulkan masalah kesehatan lingkungan dan masyarakat bila melakukan perilaku buang air besar yang tidak sehat. Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) menyebabkan kotoran-kotoran terekspos sehingga dapat mencemari air dan kuman-kuman yang membahayakan kesehatan manusia secara langsung. Penyakit yang dapat ditimbulkan dari sanitasi yang buruk dan perilaku BABS bisa menyebabkan penyakit diare yang merupakan salah satu penyebab kematian anak yang cukup tinggi. Dari hasil data PODES 2014 menunjukkan bahwa sudah seluruh kelurahan (267 kelurahan) di DKI Jakarta sebagian besar keluarga mempunyai jamban sendiri sebagai tempat buang air besar.

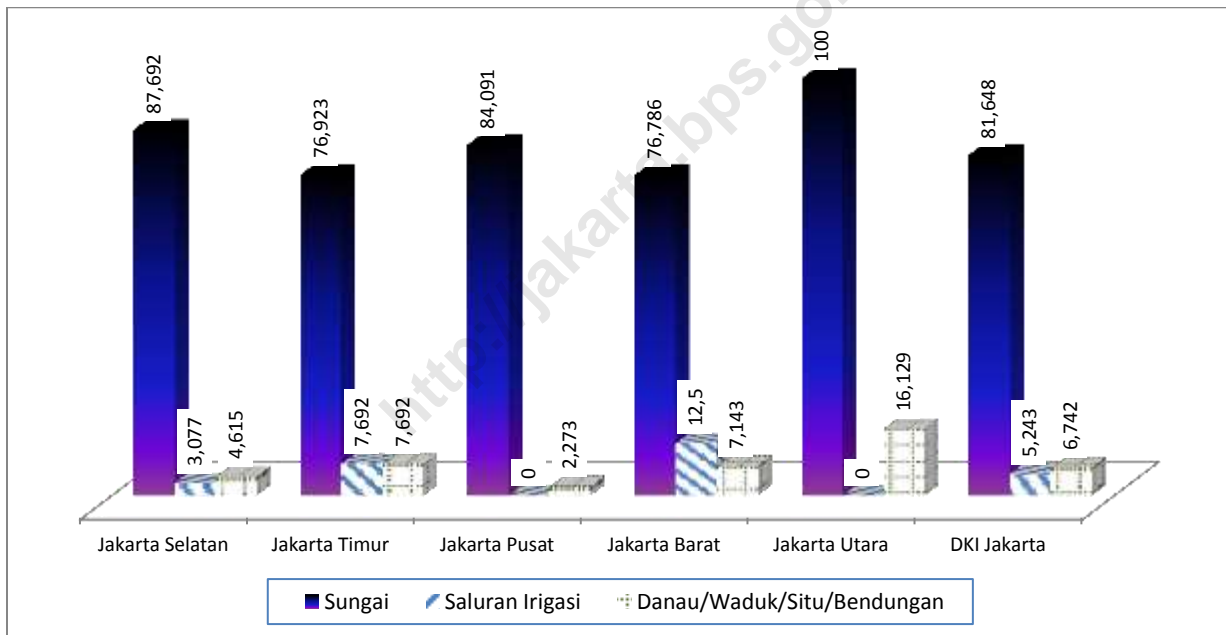
3.2. Sungai, saluran irigasi, dan danau/waduk/situ/bendungan

Sungai adalah tempat, wadah dan jaringan air yang terbentuk secara alamiah maupun buatan mulai dari mata air (hulu) sampai muara (hilir) dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai yang dimaksud dalam hal ini termasuk anak sungai, kanal dan sodetan. Sempadan sungai berbeda dengan bantaran sungai. Fungsi dari bantaran sungai adalah tempat mengalirnya sebagian debit sungai pada saat banjir (*high water channel*) (Yodi Isnaini,2006). Sehubungan dengan itu maka dilarang membuang sampah dan mendirikan bangunan untuk hunian pada bantaran sungai. Sedangkan sempadan sungai berfungsi ketika saat musim hujan dan debit sungai meningkat menjadi daerah parkir air atau genangan sehingga air bisa meresap ke tanah. Fungsi sempadan sungai adalah proses konservasi hidrolis sungai dan air tanah.

Berdasarkan wilayah topografinya, wilayah DKI Jakarta dikategorikan sebagai daerah datar dan landai. Sebanyak 40 persen datarannya berada di bahwas muka laut pasang dan dialiri oleh 13 sungai. Ke tigabelas sungai yang melalui wilayah DKI Jakarta yaitu :

1. Kali Mookevert
2. Kali Angke
3. Kali Pesanggrahan
4. Kali Grogol
5. Kali Krukut
6. Kali Baru/Pasar Minggu
7. Kali Ciliwung
8. Kali Baru Timur
9. Kali Cipinang
10. Kali Sunter
11. Kali Buaran
12. Kali Jatikramat
13. Kali Cakung

Gambar 3.4. Persentase Jumlah Kelurahan menurut Keberadaan Sungai, Saluran Irigasi, Danau/Waduk/Situ/Bendungan Menurut Wilayah, DKI Jakarta, 2014



Sumber : Podes 2014

Pendataan Podes 2014 melihat apakah suatu wilayah dilewati sungai atau terdapat keberadaan sungai atau tidak. Dari 267 kelurahan yang berada di DKI Jakarta terdapat 218 (81,65 persen) kelurahan dilalui sungai. Menurut wilayah terlihat bahwa Jakarta Selatan 87,7 persen (57 kelurahan dari 65 kelurahan), Jakarta Timur 76,9 persen (50 kelurahan dari 65) , Jakarta Pusat 84,1 persen (37 Kelurahan dari 44 kelurahan), Jakarta Barat 76,8 persen (43 kelurahan dari 56 kelurahan) dan Jakarta Utara 100 persen (seluruh kelurahan) dilewati oleh sungai.

Banyaknya wilayah di DKI Jakarta yang dilewati sungai menyebabkan keberadaan sungai harus menjadi perhatian khusus pemerintahan DKI Jakarta. Salah satu ancaman yang sering terjadi dalam menghadapi kondisi alam di DKI Jakarta dengan banyaknya wilayah yang dilewati sungai adalah masalah banjir. Sejak tahun 2007, Pemerintahan DKI Jakarta memfokuskan enam aspek dalam mengatasi banjir yang sering terjadi di DKI Jakarta. Enam aspek tersebut adalah pembangunan banjir kanal, normalisasi sungai, pemeliharaan sungai, antisipasi air pasang dengan pembuatan tanggul, penataan kali dan saluran dan pembangunan pompa, pintu air dan saringan sampah.

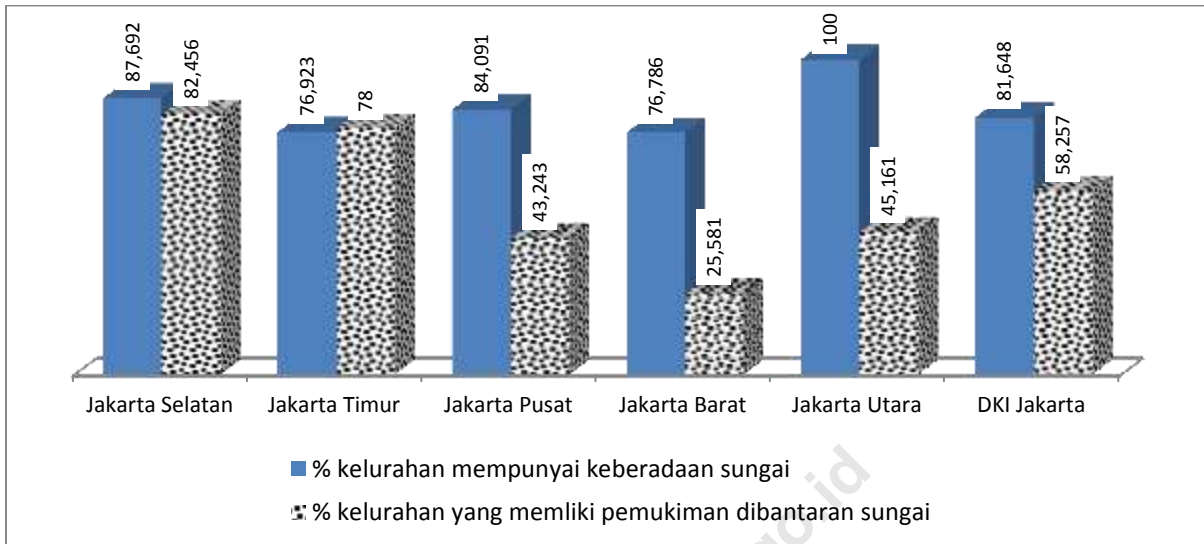
Saluran irigasi adalah kesatuan bangunan dan saluran untuk mengatur penyediaan, pengambilan, dan pengambilan air irigasi. Menurut hasil PODES tahun 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 5,2 persen atau sebanyak 14 kelurahan dari 267 kelurahan di DKI Jakarta dilewati oleh saluran irigasi. Wilayah yang terbanyak dilewati oleh saluran irigasi adalah Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Salah satu sumber daya air lainnya yang berada di DKI Jakarta adalah keberadaan waduk dan situ. Keberadaan waduk dan situ di DKI Jakarta dapat menjadi cadangan air tanah ketika musim kemarau, pengendali banjir pada saat musim hujan dan dapat digunakan untuk kepentingan lain dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DKI Jakarta. Menurut Hasil PODES 2014, sebanyak 18 kelurahan dari 267 kelurahan (6,74 persen) di DKI Jakarta terdapat situ atau waduk. Persentase kelurahan yang terdapat situ atau waduk menurut Kabupaten/Kota yang terbesar di Jakarta Utara 16,1 persen. Di Jakarta Timur terdapat 7,7 persen kelurahan terdapat situ atau waduk, Jakarta Barat 7,1 persen, Jakarta Selatan 4,6 persen dan Jakarta Pusat 2,3 persen (Gambar 3.4).

Pembangunan di DKI Jakarta yang sangat pesat secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas air di areal waduk dan situ. Kualitas air di areal waduk dan situ menjadi buruk karena menjadi penampung limbah penduduk dan sampah. Kuantitas air di areal waduk dan situ menjadi berkurang karena berubah fungsi menjadi daratan untuk perumahan, perkantoran, dll.

Tingginya tingkat kepadatan penduduk, pesatnya pembangunan dan terbatasnya lahan di wilayah DKI Jakarta menyebabkan wilayah bantaran sungai mengalami peralihan fungsi lahan menjadi wilayah pemukiman. Wilayah pemukiman di bantaran sungai yang seharusnya menjadi daerah tangkapan air dapat menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah tersebut dan wilayah-wilayah lain. Gambar 3.5. menggambarkan persentase wilayah yang dilalui sungai dan wilayah yang mempunyai pemukiman di daerah bantaran sungai.

Gambar 3.5. Persentase Jumlah Kelurahan yang Mempunyai Sungai dan Keberadaan Pemukiman di bantaran Sungai Menurut Wilayah, DKI Jakarta, 2014



Sumber : Podes 2014

Dari 267 kelurahan di DKI Jakarta sebanyak 218 kelurahan (81,6 persen) mempunyai/dilalui sungai. Dari 218 kelurahan yang mempunyai sungai sebanyak 127 kelurahan (58,3 persen) terdapat bantaran sungai yang digunakan sebagai pemukiman penduduk. Wilayah bantaran sungai yang digunakan untuk pemukiman penduduk di wilayah Jakarta Selatan 82,5 persen (47 dari 57 kelurahan yang dilalui sungai), Jakarta Timur 78 persen (39 dari 50 kelurahan yang dilalui sungai), Jakarta Pusat 43,2 persen (16 dari 37 kelurahan yang dilalui sungai), Jakarta Barat 25,6 persen (11 dari 43 kelurahan yang dilalui sungai) dan Jakarta Utara 45,2 persen (14 dari 31 kelurahan yang dilalui sungai).

Banyaknya kelurahan yang mempunyai pemukiman di bantaran sungai di DKI Jakarta harus menjadi perhatian Pemerintah karena selain berupa pemukiman-pemukiman kumuh yang mengganggu keindahan kota juga mengurangi fungsi sungai. Pemerintahan DKI Jakarta akan secara tegas mengusir pemukiman-pemukiman yang berada di bantaran sungai dan sebagai solusinya pemerintahan DKI Jakarta telah membangun hunian vertikal baik untuk disewakan maupun dijual (Rusun maupun Rusunawa).

a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)

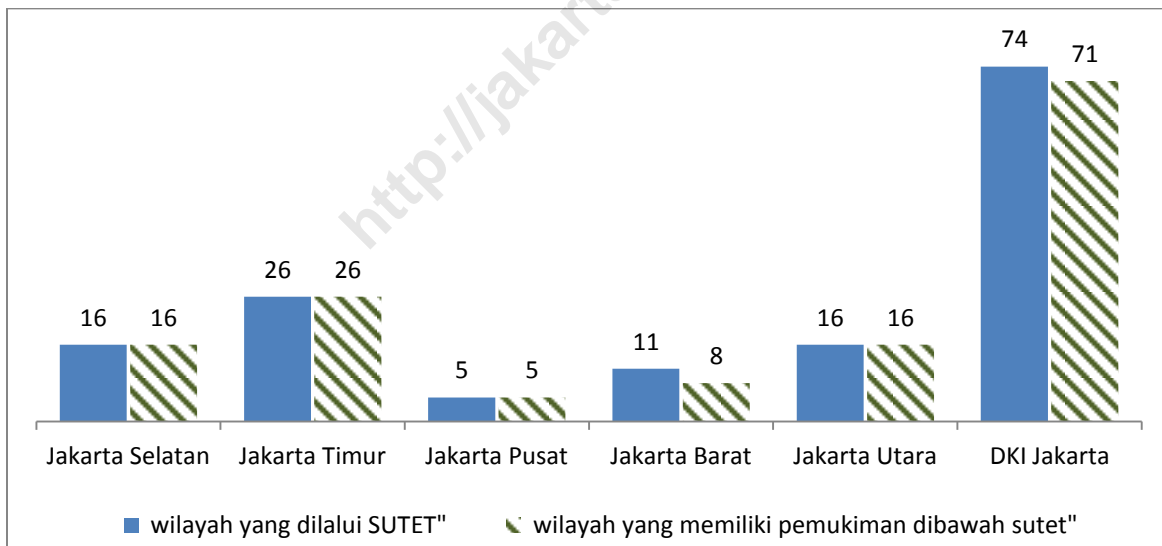
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah jaringan kawat beraliran listrik bertegangan lebih besar dari 200-500 KV untuk pendistribusian listrik lintas daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan pemukiman di bawah SUTET adalah wilayah pemukiman yang berada di lintasan

jaringan SUTET dan berjarak kurang lebih dari 20 meter (Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1.P/47/MTE/1992).

Pesatnya pembangunan dan besarnya jumlah penduduk di DKI Jakarta membuat kebutuhan akan tenaga listrik sangat tinggi, dan menyebabkan banyaknya wilayah di DKI Jakarta yang memiliki SUTET. Dari hasil potensi desa tahun 2014 menunjukkan sebanyak 74 kelurahan (27,71 persen) dilalui SUTET. Wilayah yang paling banyak memiliki SUTET adalah Jakarta Timur sebanyak 26 kelurahan, dan wilayah yang paling sedikit memiliki SUTET adalah Jakarta Pusat (Gambar 3.6).

Yang menjadi permasalahan di DKI Jakarta adalah adanya pemukiman-pemukiman yang berada di lintasan SUTET. Dari 74 kelurahan di DKI Jakarta yang memiliki SUTET, 71 kelurahannya (95,95 persen) terdapat pemukiman di bawah SUTET. Gambar 3.6 memperlihatkan bahwa semua wilayah kelurahan di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara yang memiliki SUTET dibawahnya terdapat pemukiman masyarakat.

Gambar 3.6. Persentase Jumlah kelurahan yang memiliki Fasilitas SUTET dan Keberadaan Pemukiman di bawah SUTET menurut Wilayah, DKI Jakarta, 2014



Sumber : Podes 2014

b. Pemukiman Kumuh

Pemukiman kumuh dalam PODES adalah wilayah pemukiman yang mempunyai bangunan yang padat dan jumlah penduduk yang padat, dan kebanyakan tidak layak huni serta mempunyai sanitasi lingkungan yang buruk. Hampir 70 persen kelurahan (184 dari 267 kelurahan) di DKI Jakarta terdapat

kawasan pemukiman kumuh. Kelurahan dengan kawasan pemukiman kumuh terbanyak berada di Jakarta Utara (27 dari 31 Kelurahan), Jakarta Pusat (37 dari 44 kelurahan). Kepulauan Seribu dan Jakarta Selatan memiliki kelurahan yang dengan kawasan pemukiman kumuh paling sedikit di DKI Jakarta.

Gambar 3.7. Jumlah Kelurahan Kumuh Menurut karakteristik dan Wilayah, DKI Jakarta, 2014



Sumber : Podes 2014

c. Pencemaran Lingkungan Hidup

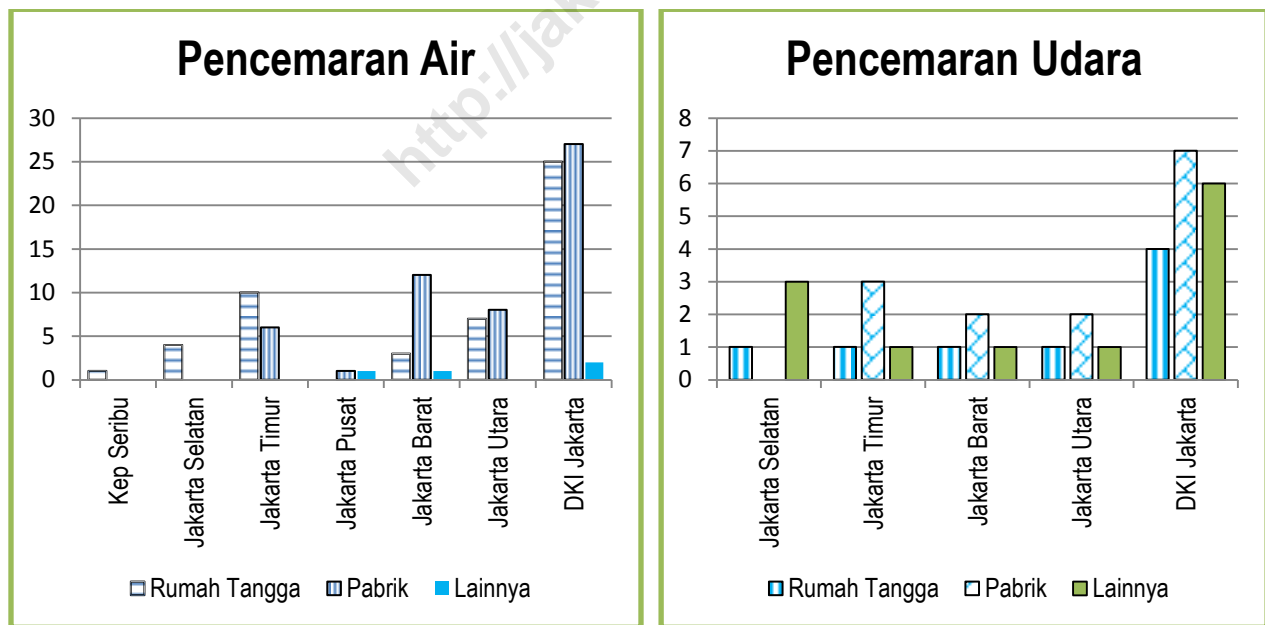
Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah pencemaran seperti air, tanah dan udara yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia biasanya terjadi dengan proses alamiah karena adanya aktivitas manusia. Pencemaran air bisa terjadi dari buangan industri yang membuang limbahnya tanpa pengolahan terlebih dahulu ke sungai, buangan rumah tangga seperti pembuangan tinja/kotoran, sampah langsung ke sungai maupun buangan lainnya seperti limbah-limbah perkantoran dan pertokoan.

Gambar 3.8 yang menunjukkan banyaknya kelurahan di DKI Jakarta yang mengalami pencemaran lingkungan dalam bentuk pencemaran air. Terdapat sebanyak 54 kelurahan yang mengalami pencemaran air, dimana 25 kelurahan dengan sumber utama dari buangan limbah rumah tangga, 27 kelurahan yang dengan sumber utamanya dari buangan limbah industri dan 2 kelurahan sumber utamanya dari buangan lainnya. Menurut wilayah digambarkan bahwa untuk Jakarta Barat dan Jakarta Utara sumber utama pencemaran airnya lebih banyak dari limbah industri dibandingkan dengan limbah rumah tangga, sebaliknya untuk Jakarta Selatan dan Jakarta Timur sumber utama pencemaran airnya lebih banyak dari limbah rumah tangga dibandingkan dengan limbah industri.

Pencemaran udara juga banyak terjadi di DKI Jakarta. Menurut hasil PODES tahun 2014 menunjukkan bahwa ada 17 kelurahan di DKI Jakarta yang mengalami pencemaran udara. Pencemaran udara tertinggi terdapat di wilayah Jakarta timur sedangkan untuk wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Pusat tidak terdapat pencemaran udara. Penyebab utama pencemaran udara terjadi berbeda setiap daerah di DKI Jakarta. Jakarta Selatan menunjukkan pencemaran udara sumber utamanya bukan dari rumah tangga ataupun pabrik, tetapi dari lainnya yang mungkin bersumber dari aktivitas seperti perkantoran, pertokoan, restoran, dll. Sedangkan untuk wilayah Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Utara penyebab utama pencemaran udara adalah dari aktivitas pabrik-pabrik yang berada di lokasi tersebut.

Pencemaran udara di Jakarta banyak disebabkan oleh buangan gas kendaraan bermotor, aktivitas perumahan seperti masak-memasak, pemakaian aerosol, pembakaran sampah, dan aktivitas industri, baik industri berskala rumah tangga maupun berskala besar. Hal yang menyebabkan semakin memburuknya pencemaran udara di DKI Jakarta adalah banyaknya gedung-gedung bertingkat yang menyebabkan sulitnya sirkulasi udara dan menyebabkan akumulasi polutan di beberapa area tertentu.

Gambar 3.8. Banyaknya Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran dan Wilayah, DKI Jakarta, 2014

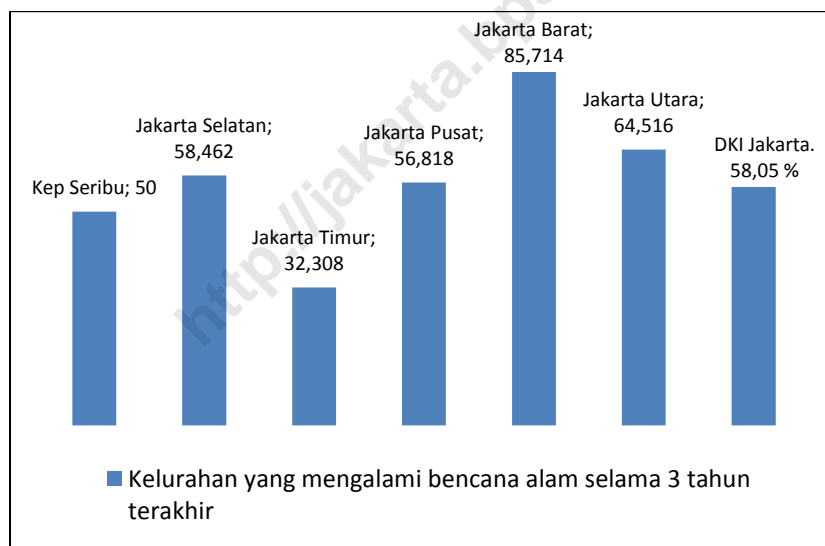


Sumber : Podes 2014

BAB IV. ANTISIPASI DAN KEJADIAN BENCANA ALAM

DKI Jakarta memiliki sistim mitigasi atau antisipasi bencana alam berupa sistim peringatan dini bencana alam, perlengkapan keselamatan dan jalur evakuasi. Dari 267 kelurahan di DKI Jakarta sudah terdapat 64 kelurahan (23,97 persen) yang memiliki mitigasi berupa sistim peringatan dini bencana alam. Salah satu sistim peringatan dini atau *Early Warning System (EWS)* di DKI Jakarta yang paling dibutuhkan adalah EWS terhadap banjir karena DKI Jakarta merupakan daerah rawan banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa salah satu peringatan dini terhadap bencana banjir adalah pemantauan ketinggian muka air di sembilan pintu air secara *real time*, serta *broadcast message* kepada warga soal potensi banjir melalui *Short Message Service (SMS)* dan media Sosial.

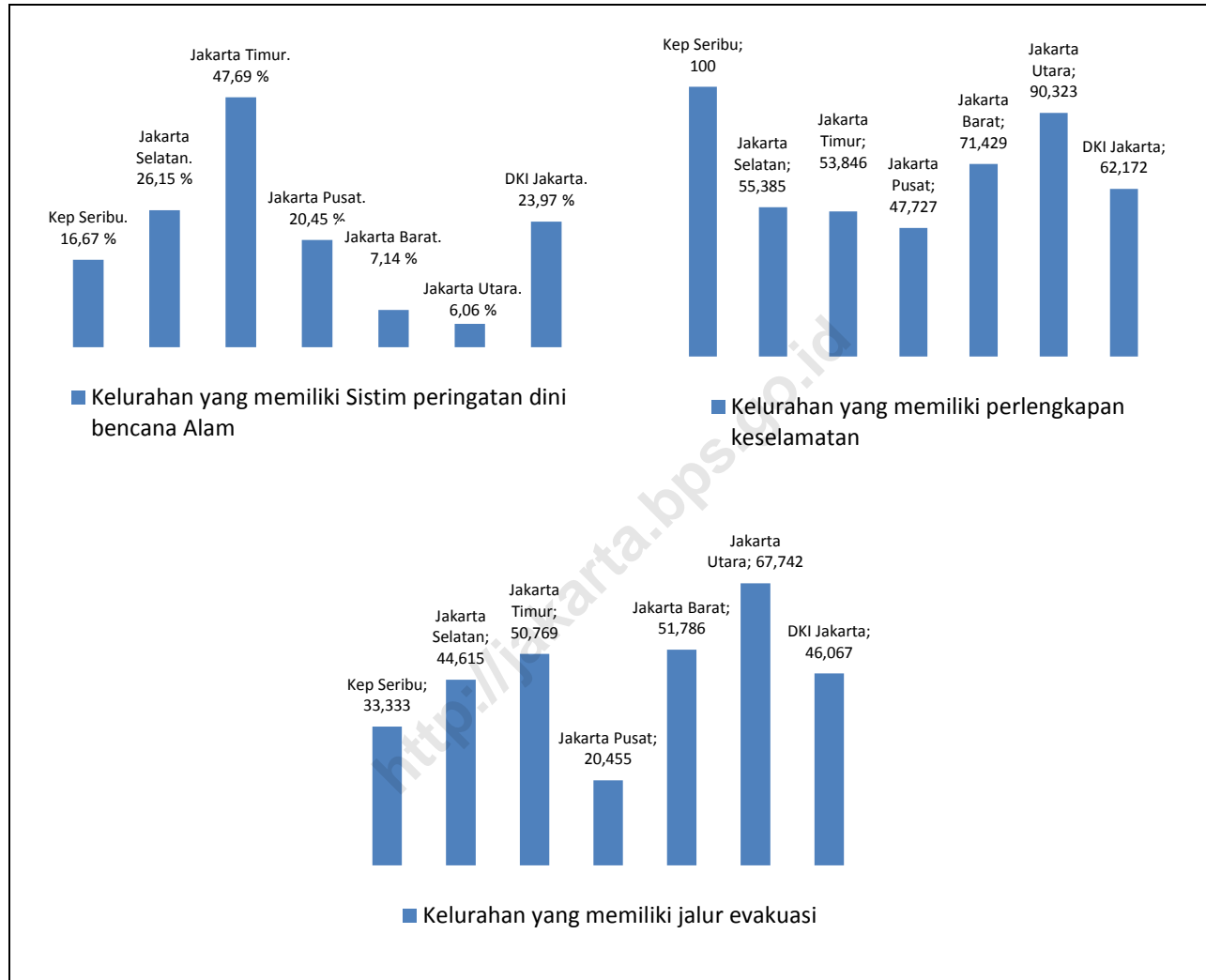
Gambar 4.1. Persentase Jumlah Kelurahan yang mengalami Bencana Alam Selama 3 Tahun Terakhir (2011-2014) Menurut Wilayah, DKI Jakarta, 2014



Sumber : Podes 2014

Di DKI Jakarta, seluruh wilayah Kabupaten/Kota pernah mengalami bencana alam selama 3 tahun terakhir. Dari gambar 4.1 terlihat bahwa 58,05 persen kelurahan di DKI Jakarta pernah mengalami bencana alam selama 3 tahun terakhir. Di Jakarta Barat memiliki persentase kelurahan yang mengalami bencana selama 3 tahun terakhir yang tertinggi di DKI Jakarta. Sedangkan Jakarta Timur memiliki persentase jumlah kelurahan yang mengalami bencana alam selama 3 tahun terakhir terendah di DKI Jakarta.

Gambar 4.2 Fasilitas Mitigasi Menurut Jenis Fasilitas dan Wilayah



Sumber : Podes 2014.

Sistim mitigasi juga sudah dimiliki oleh seluruh Kabupaten/Kota di DKI Jakarta. Menurut wilayah terlihat bahwa sistim mitigasi berupa sistim peringatan dini bencana alam tertinggi berada di wilayah Jakarta Timur, 31 kelurahan dari 65 kelurahan (47,69 persen). Wilayah lain di DKI Jakarta yang memiliki mitigasi sistim peringatan dini bencana alam adalah Kabupaten Kepulauan Seribu 16,67 persen (1 dari 6 kelurahan), Jakarta Selatan (17 dari 65 kelurahan), Jakarta Pusat (9 dari 44 Kelurahan), Jakarta Barat (4 dari 56 Kelurahan) dan Jakarta Utara (2 dari 33 kelurahan). Sistim peringatan dini digunakan agar para pengambil kebijakan di bidang mitigasi dan penganggulangan bencana alam lebih mudah mengambil

keputusan untuk melakukan tindakan yang dapat dipersiapkan sebelum, pada saat, maupun pasca kejadian bencana alam.

Sistim mitigasi lainnya yang ada di DKI Jakarta adalah perlengkapan keselamatan seperti perahu karet, tenda, persediaan masker dsb. Dari 267 kelurahan di DKI Jakarta, sebanyak 166 kelurahan (62,17 persen) sudah memiliki sistim mitigasi berupa perlengkapan keselamatan. Persentase jumlah kelurahan yang memiliki sistim mitigasi berupa perlengkapan keselamatan ada di wilayah Jakarta Utara 90,32 persen (28 dari 31 kelurahan), kemudian Jakarta Barat 71,43 persen (40 dari 56 kelurahan), Jakarta Selatan 55,38 persen (36 dari 65 kelurahan), Jakarta Timur 53,85 persen (35 dari 65 kelurahan) dan yang terendah berada di Jakarta Pusat 47,73 persen (21 dari 44 kelurahan).

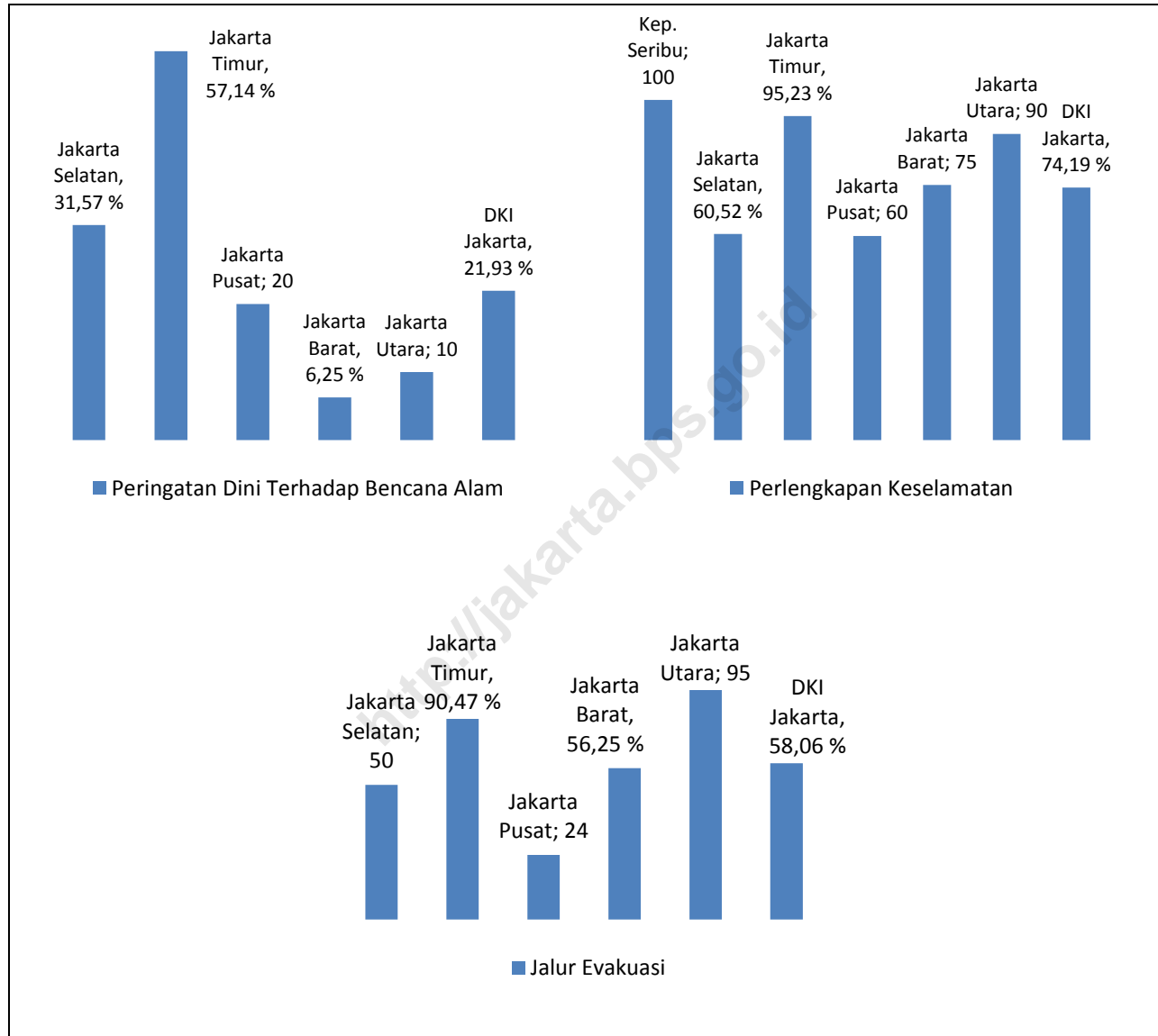
Sistim mitigasi berupa jalur evakuasi juga terdapat di DKI Jakarta. Yang dimaksud jalur evakuasi dalam Potensi Desa 2014 adalah ketersediaan fasilitas evakuasi baik dalam bentuk peta, petunjuk evakuasi dan lokasi aman untuk berkumpul. Jumlah Kelurahan yang memiliki fasilitas sistim mitigasi berupa jalur evakuasi di wilayah DKI Jakarta lebih rendah jika dibandingkan fasilitas sistim mitigasi berupa perlengkapan keselamatan, namun lebih tinggi jika dibandingkan fasilitas sistim mitigasi berupa peringatan dini bencana alam. Dari 267 kelurahan di DKI Jakarta terdapat 46,07 persen atau 123 kelurahan yang memiliki sistim mitigasi berbentuk jalur evakuasi.

Jumlah kelurahan yang memiliki fasilitas sistim mitigasi berupa jalur evakuasi tertinggi berada di Jakarta Utara 67,74 persen (21 dari 31 kelurahan), Jakarta Barat 51,79 persen (29 dari 56 kelurahan), Jakarta Timur 50,77 persen (33 dari 65 kelurahan), Jakarta Selatan 44,62 persen (29 dari 65 kelurahan), Kep Seribu 33,33 persen (2 dari 6 kelurahan) dan terendah berada di Jakarta Pusat 20,45 persen (9 dari 44 kelurahan).

Gambar 4.3 menunjukkan kelurahan-kelurahan yang pernah mengalami bencana alam selama 3 tahun terakhir (2011-2014) dan keberadaan atau kepemilikan fasilitas mitigasi bencana alam. dan Dari 155 kelurahan yang pernah mengalami bencana alam selama 3 tahun terakhir di DKI Jakarta menunjukkan belum semua kelurahan memiliki sistim mitigasi, baik itu berupa peringatan dini terhadap bencana alam, perlengkapan keselamatan maupun jalur evakuasi. Sistim mitigasi berupa peringatan dini terhadap bencana alam hanya 21,9 persen (34 dari 155 kelurahan), sistim mitigasi berupa perlengkapan keselamatan 74 persen (115 dari 155 kelurahan) dan sistim mitigasi berupa jalur evakuasi 58,1 persen (90 dari 155 kelurahan). Fasilitas sistim mitigasi peringatan dini terhadap bencana alam terendah dibandingkan

fasilitas mitigasi lainnya. Bahkan wilayah Kepulauan Seribu tidak memiliki fasilitas mitigasi berupa peringatan dini terhadap bencana alam.

Gambar 4.3 Persentase Jumlah Kelurahan yang pernah mengalami Bencana Alam 3 Tahun Terakhir (2011-2014) Menurut Keberadaan Fasilitas Mitigasi dan Wilayah, DKI Jakarta, 2014



Sumber : Podes 2014

Bila dilihat dari kesiapan fasilitas mitigasi kelurahan-kelurahan yang pernah mengalami bencana alam, yang tertinggi berada di Jakarta Timur dimana 57,1 persen kelurahan memiliki fasilitas peringatan dini terhadap bencana alam, 95,2 persen memiliki fasilitas perlengkapan keselamatan, dan 90,5 persen kelurahan memiliki fasilitas jalur evakuasi.

Kesiapan fasilitas mitigasi kelurahan-kelurahan yang pernah mengalami bencana alam di Jakarta Pusat menunjukkan bahwa hanya 20 persen kelurahan yang pernah mengalami bencana alam memiliki fasilitas mitigasi peringatan dini terhadap bencana alam, 60 persen memiliki fasilitas perlengkapan keselamatan dan hanya 24 persen yang memiliki fasilitas jalur evakuasi. Wilayah lain yang memiliki fasilitas mitigasi yang kurang adalah wilayah Jakarta Barat. Kesiapan fasilitas mitigasi di Jakarta Barat terhadap kelurahan-kelurahan yang pernah mengalami bencana alam menunjukkan hanya 6,3 persen memiliki fasilitas peringatan dini terhadap bencana alam, 75 persen memiliki fasilitas perlengkapan keselamatan dan 56,3 persen memiliki fasilitas jalur evakuasi.

<http://jakarta.bps.go.id>

BAB V. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Pembangunan Manusia berkualitas dimulai pada bidang pendidikan dan kesehatan, karena dengan pendidikan manusia menjadi cerdas dan pintar, dan dengan kesehatan manusia akan sehat dan energik dalam melakukan semua aktifitasnya. Keduanya saling mendukung antara satu dan lainnya, seperti dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia di mana kedua bidang ini digunakan sebagai komponen dasar pengukuran kualitas manusia pada suatu bangsa/negara. Dimana ketiga komponen dasar pengukuran IPM yaitu dimensi pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dimensi kesehatan (panjang umur) dan dimensi hidup layak (kemampuan daya beli suatu masyarakat terhadap kebutuhan pokok) .

5.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang berperan sangat penting terhadap kemajuan suatu bangsa, oleh karena itu berbagai upaya dilakukan pemerintah demi tercapainya keberhasilan pembangunan manusianya. Melalui peningkatan di bidang pendidikan diharapkan peningkatan sumber daya manusia menjadi lebih berkualitas akan tercapai, seperti yang diamanatkan dalam UUD 45 pasal 31 dan RPJM, dimana dinyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Wajib belajar sembilan tahunpun mulai diwajibkan kepada semua warga negara khususnya pada penduduk usia sekolah. Sarana dan prasarana dibidang pendidikan setiap tahunnya dibenahi, hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam UUD 45 pasal 30 ayat 4 berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurang 20 % dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional”.

Berbagai sarana dan prasarana di bidang pendidikan secara bertahap dibenahi oleh pemerintah, mulai dari keberadaan sekolah menurut jenjang pendidikan, lembaga ketrampilan dan ketersediaan Pendidikan Anak Dini (PAUD), Kelompok bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang semakin baik dan meningkat. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait penyediaan sarana dan prasarana pendidikan tidak terlepas dari jumlah penduduk di kabupaten/kota tersebut.

Meskipun sekolah TA/BA/RA merupakan sekolah dengan status pra-sekolah/sekolah yang dipersiapkan untuk murid menuju sekolah dasar. Namun keberadaannya juga merupakan bagian dari yang

dipersiapkan oleh pemerintah. Banyaknya kelurahan di Provinsi DKI Jakarta yang sudah mempunyai sekolah dengan jenjang pendidikan TA/BA/RA sebanyak 261 kelurahan dengan sekolah 2.187 sekolah. Semua kelurahan di Kabupaten Kepulauan Seribu (6 kelurahan), Kota Administrasi Jakarta Timur (65 kelurahan) dan Kota Administrasi Jakarta Utara (31 kelurahan) sudah mempunyai sekolah TA/BA/RA, dimana jumlah sekolah TK/BA/RA Kota Administrasi Jakarta Timur ada 675 sekolah, Kota Administrasi Jakarta Selatan ada 554 sekolah, Kota Administrasi Jakarta Barat 406 sekolah, Kota Administrasi Jakarta Utara 335 sekolah dan Kabupaten Kepulauan Seribu ada 17 sekolah.

Sekolah dengan jenjang pendidikan SD/MI keberadaanya ada di 264 kelurahan dengan jumlah sekolah 2.228 sekolah. Empat wilayah kabupaten/kota yang keberadaan sekolah SD/MI ada di setiap kelurahan yaitu di Kabupaten Kepulauan Seribu (15 sekolah), Kota Administrasi Jakarta Timur (679 sekolah), Kota Administrasi Jakarta Barat (446 sekolah) dan Kota Administrasi Jakarta Utara (268 sekolah).

Tabel 5.1. Persentase Kelurahan Menurut Jenjang Pendidikan dan Wilayah di DKI Jakarta, 2014

Kab/Kota	Jumlah Kelurahan	TK/BA/RA		SD/MI		SMP/MTs		SMU/MA		Akademi/PT	
		% Kelurahan	Jml Sekolah	% Kelurahan	Jml Sekolah	% Kelurahan	Jml Sekolah	% Kelurahan	Jml Sekolah	% Kelurahan	Jml Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kepulauan Seribu	6	100,0	17	100,0	15	83,3	10	50,0	3	-	0
Kota Jakarta Selatan	65	98,5	554	96,9	538	95,4	265	83,1	131	80,0	94
Kota Jakarta Timur	65	100,0	675	100,0	679	100,0	324	87,7	177	63,1	83
Kota Jakarta Pusat	44	95,4	210	97,7	282	86,4	134	75,0	68	56,8	55
Kota Jakarta Barat	56	94,6	406	100,0	446	94,6	285	82,1	142	25,0	19
Kota Jakarta Utara	31	100,0	335	100,0	268	96,8	219	96,8	95	45,2	18
DKI JAKARTA	267	97,8	2.197	98,9	2.228	94,8	1.237	83,5	616	54,7	269

Sumber : Podes 2014

Sedangkan sekolah dengan jenjang pendidikan SMP/MTs menurut wilayah kabupaten/kota, Kabupaten Kepulauan Seribu yang kelurahannya paling sedikit memiliki sekolah dengan jenjang SMP/MTs berada di 5 kelurahan (10 sekolah) dan kota yang jumlah kelurahannya banyak memiliki sekolah untuk jenjang ini berada di Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu berada di 65 kelurahan (324 sekolah). Dari dua

jenjang pendidikan yaitu sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang terdapat di hampir semua kelurahan di kabupaten/kota Provinsi DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang menerapkan “Wajib Belajar 9 Tahun” bagi penduduk usia sekolah dan sejalan dengan amandemen yang terdapat dalam UUD 45 pasal 30.

Gambaran sekolah menurut kelurahan dengan jenjang pendidikan SMU/MA, jumlah kelurahan yang terbanyak memiliki sekolah dengan jenjang ini berada di Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu di 30 kelurahan dengan jumlah sekolah 95, kemudian Kota Administrasi Jakarta Timur terdapat di 57 kelurahan dengan jumlah sekolah 177. Sementara kelurahan yang terbanyak keberadaan sekolah akademi/ perguruan tinggi di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu di 52 kelurahan, dengan jumlah akademi/ perguruan tinggi sebanyak 94 sekolah. Kabupaten Kepulauan Seribu kondisinya agak berbeda dimana tidak ada kelurahan yang mempunyai sekolah pada jenjang akademi/ perguruan tinggi

Keberadaan lembaga ketrampilan merupakan bagian dari pembangunan di bidang pendidikan. Dengan adanya lembaga ketrampilan yang tersebar di kelurahan akan berdampak positif terhadap kehidupan manusia melalui kecakapan/ketrampilan yang dimiliki seseorang. Dengan keberadaan lembaga ketrampilan yang tersebar di kelurahan-kelurahan akan memberi kemudahan pada masyarakat untuk mengakses/mengikuti kursus dengan mudah. Dengan berbekal kursus di lembaga ketrampilan akan bermanfaat pada kecakapan/ketrampilan seseorang/keluarga untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada gilirannya dengan ketrampilan yang dimiliki kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik dibandingkan tidak mempunyai ketrampilan. Lembaga-lembaga ketrampilan diantaranya lembaga ketrampilan bahasa asing, komputer, menjahit/tata busana, kecantikan, motir mobil dan motor, elektronika dan lainnya baik yang diusahakan oleh pemerintah (BLK) maupun oleh pihak swasta.

Data Podes 2014 Tabel 5.2, memperlihatkan lembaga ketrampilan yang banyak tersebar pada kelurahan-kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, adalah bahasa asing, komputer, menjahit/tata busana, kecantikan, montir mobil dan motor, elektronika. Di urutan teratas lembaga ketrampilan bahasa asing berada di 151 kelurahan dengan jumlah lembaga 315, disusul lembaga ketrampilan komputer berada di 132 kelurahan dengan jumlah lembaga 271, di urutan ke tiga lembaga ketrampilan menjahit/tata busana berada di 88 kelurahan dengan jumlah lembaga 204, di urutan ke empat lembaga ketrampilan kecantikan berada di 76 kelurahan dengan jumlah 132, di urutan ke lima montir mobil/motor berada di 64 kelurahan dengan jumlah lembaga 130 dan di urutan ke enam lembaga ketrampilan elektronika berada di 24 kelurahan dengan jumlah lembaga 86.

Berdasarkan wilayah kabupaten/kota, Kota Administrasi Jakarta Timur menduduki posisi terbanyak dari kelurahan dengan jumlah lembaga ketrampilan. Untuk lembaga ketrampilan bahasa asing berada di 42 kelurahan (100 lembaga bahasa asing), komputer berada di 39 kelurahan (82 lembaga komputer), menjahit/tata busana berada di 28 kelurahan (89 lembaga menjahit/tata busana), kecantikan berada di 22 kelurahan (37 lembaga kecantikan) dan montir mobil/motor berada di 26 kelurahan (53 lembaga montir mobil/motor). Sementara di Kabupaten Kepulauan Seribu seluruh kelurahan tidak terdapat lembaga ketrampilan.

Tabel 5.2. Persentase Kelurahan Menurut Lembaga Ketrampilan dan Wilayah di DKI Jakarta, 2014

Kab/Kota	Bahasa Asing		Komputer		Menjahit		Kecantikan		Montir Mobil/Motor		Elektronika		Lainnya	
	% Kelurahan	Jml Lembaga	% Kelurahan	Jml Lembaga	% Kelurahan	Jml Lembaga	% Kelurahan	Jml Lembaga	% Kelurahan	Jml Lembaga	% Kelurahan	Jml Lembaga	% Kelurahan	Jml Lembaga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kepulauan Seribu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Selatan	50,8	61	44,6	73	33,8	49	20,0	16	21,5	45	6,2	11	20,0	51
Kota Jakarta Timur	64,6	100	60,0	82	43,1	89	33,8	37	40,0	53	15,4	33	26,2	31
Kota Jakarta Pusat	36,4	25	29,5	18	25,0	13	13,6	8	18,2	12	2,3	2	13,6	7
Kota Jakarta Barat	69,6	87	50,0	61	37,5	40	37,5	48	23,2	16	10,7	11	16,1	31
Kota Jakarta Utara	67,7	42	74,2	37	19,4	13	45,2	23	9,7	4	9,7	29	25,8	13
DKI JAKARTA	56,6	315	49,4	271	33,0	204	28,5	132	24,0	130	9,0	86	19,9	133

Sumber : Podes 2014

Seperti halnya keberadaan sekolah dan lembaga ketrampilan yang mendapat perhatian penting dari pemerintah, keberadaan kegiatan pemberantasan buta aksara/keaksaraan fungsional, dan kegiatan pendidikan paket A/B/C, pos pendidikan anak dini (PAUD), Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) juga mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah. Keberadaan mengenai ketersediaan kegiatan pemberantasan buta aksara/keaksaraan fungsional, dan kegiatan pendidikan paket A/B/C lebih dikhususkan pada wilayah-wilayah dengan akses ke lokasi sekolah dan akses ke lembaga ketrampilan yang relatif sulit dijangkau oleh masyarakatnya,

sedangkan pemberantasan buta huruf khususnya diperuntukkan bagi orang-orang tua yang tidak pernah sekolah/berhenti sekolah karena berbagai sebab.

Di Provinsi DKI Jakarta kegiatan pemberantasan keaksaraan fungsional terdapat di 48 kelurahan. Kegiatan pemberantasan keaksaraan fungsional dilihat menurut wilayah kabupaten/kota keberadaan terbanyak dari jumlah kelurahan berada di Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu 71 persen (22 kelurahan). Sedangkan kelurahan yang paling sedikit keberadaan kegiatan pemberantasan keaksaraan fungsional berada di Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu 1,5 persen (berada di 1 kelurahan), (Tabel 5.3).

Tabel 5.3. Persentase Kelurahan Menurut Keberadaan Kegiatan Pemberantasan Buta Aksara/ Keaksaraan Fungsional, dan Kegiatan Pendidikan Paket A/B/C, Pos Pendidikan Anak Dini (PAUD), Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA), Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Wilayah Di DKI Jakarta, 2014

Kab/Kota	Keaksaraan Fungsional	Pendidikan Paket A/B/C	Pos PAUD	Kelompok Bermain	Taman Penitipan Anak (TPA)	Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
	% kelurahan	% kelurahan	% kelurahan	% kelurahan	% kelurahan	% kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	16,7	83,3	100,0	50,0	-	83
Kota Jakarta Selatan	13,8	30,8	96,9	63,1	16,9	46
Kota Jakarta Timur	1,5	30,8	98,5	92,3	24,6	50
Kota Jakarta Pusat	13,6	25,0	100,0	43,2	15,9	65
Kota Jakarta Barat	16,1	44,6	100,0	55,4	28,6	42
Kota Jakarta Utara	71,0	80,6	96,8	83,9	41,9	83
DKI JAKARTA	18,0	39,7	98,5	67,4	23,6	55,1

Sumber : Podes 2014

Keberadaan kegiatan pendidikan Paket A/B/C dimaksudkan sebagai kegiatan penyetaraan pendidikan setingkat SD (Paket A), setingkat SMP (paket B) dan setingkat SMA (paket C) bagi orang-orang tidak mampu/orang yang sudah tua tapi masih ingin belajar serta orang/masyarakat dengan akses menuju sekolah dengan jarak yang cukup/waktu tempuh cukup lama (wilayah terpencil/wilayah sulit). Di Provinsi DKI Jakarta keberadaan kegiatan pendidikan paket A/B/C masih cukup banyak yaitu terdapat di 106 kelurahan (39,7 persen). Jika keberadaan kegiatan menurut wilayah, Kabupaten Kepulauan Seribu yang

persentase kelurahannya terbanyak menyelenggarakan kegiatan ini yaitu 83,3 persen (di 5 kelurahan). Di urutan kedua kelurahan dengan penyelenggaraan terbanyak, berada di Kota Administrasi Jakarta Utara, yaitu sebesar 80,6 persen (25 kelurahan). Kedua wilayah ini menduduki posisi teratas untuk keberadaan pendidikan paket A/B/C dikarenakan Kabupaten Kepulauan Seribu, secara geografis berupa wilayah kepulauan yang terdiri banyak pulau-pulau kecil yang aksesnya cukup sulit, sementara Kota Administrasi Jakarta Utara masih banyak penduduk yang tidak sekolah, dan kondisi ekonomi masyarakatnya relatif rendah dibandingkan wilayah kota administrasi lainnya

Kegiatan pos PAUD dan kelompok bermain merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan bidang pendidikan, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi akses pembelajaran kepada anak-anak usia dini untuk menyenangi/mencintai belajar secara sederhana dan mengajarkan anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Menurut wilayah kabupaten/kota keberadaan kegiatan pos PAUD hampir ada di semua kelurahan yaitu 98,5 persen (263 kelurahan). Sementara untuk kelompok bermain keberadaannya belum sebanyak pos PAUD yaitu 67,4 persen (180 kelurahan). Keberadaan kelompok bermain di kelurahan menurut wilayah kabupaten/kota, terlihat di Kota Administrasi Jakarta Pusat yang paling sedikit yaitu hanya sebesar 43,2 persen (19 kelurahan) dan Kota Administrasi Jakarta Timur yang paling banyak yaitu 92,3 persen (60 kelurahan)

5.2 Kesehatan

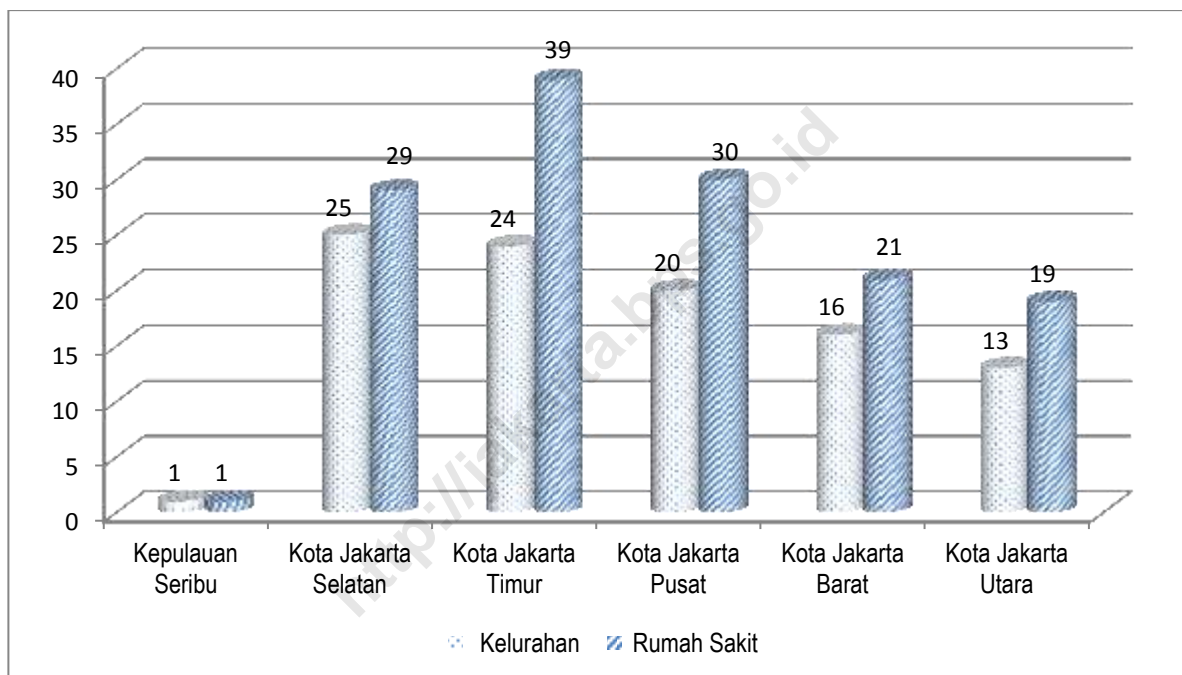
Kesehatan merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia yang dapat digambarkan melalui derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah/negara. Kondisi masyarakat yang sehat akan mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara menjadi semakin baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas masyarakat secara keseluruhan.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan yaitu melalui program-program pembangunan kesehatan di antaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata serta terjangkau oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang maksimal dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata keseluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan rumah sakit, puskesmas, rumah sakit bersalin, poliklinik, puskesmas pembantu dan fasilitas kesehatan lainnya.

Tabel 5.4, menunjukkan keberadaan rumah sakit di Propinsi DKI Jakarta terdapat di 99 kelurahan dengan jumlah rumah sakit 139 RS unit. Banyaknya jumlah kelurahan yang memiliki rumah sakit dilihat

menurut wilayah kabupaten/kota, di Kota Administrasi Jakarta Selatan terdapat di 25 kelurahan (29 RS), Kota Administrasi Jakarta Timur berada di 24 kelurahan dengan jumlah RS 39 unit, Kota Administrasi Jakarta Pusat berada di 20 kelurahan dengan jumlah RS 30 unit, Kota Administrasi Jakarta Barat berada di 16 kelurahan dengan jumlah RS 21 unit, Kota Administrasi Jakarta Utara berada di 13 kelurahan dengan jumlah RS 19 unit sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu keberadaan rumah sakit baru berada di 1 kelurahan dengan 1 RS.

Gambar 5.1. Banyaknya Kelurahan dan Jumlah Rumah Sakit Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2014



Sumber : Podes 2014

Rumah sakit bersalin dan poliklinik keberadaannya lebih banyak dibandingkan rumah sakit. Rumah sakit bersalin terdapat di 140 kelurahan, sedangkan poliklinik terdapat di 236 kelurahan. Jumlah kelurahan terbanyak yang memiliki rumah bersalin dan poliklinik terdapat di Kota Administrasi Jakarta Timur, dimana rumah sakit bersalin berada di 41 kelurahan (jumlah 84 RSB) dan poliklinik ada di 64 kelurahan (jumlah 249 klinik). Di urutan kedua jumlah kelurahan dengan keberadaan rumah sakit bersalin dan poliklinik terbanyak adalah Kota Administrasi Jakarta Utara. Untuk rumah sakit bersalin berada di 19 kelurahan (jumlah 42 RSB) dan poliklinik berada di 30 desa kelurahan (jumlah 193 klinik). Untuk Kabupaten Kepulauan Seribu keberadaan rumah sakit bersalin hanya berada 1 kelurahan (jumlah RSB 1) sedang untuk keberadaan poliklinik belum ada kelurahan yang memiliki.

Tabel 5.4. Banyaknya Kelurahan Menurut Sarana Kesehatan dan Wilayah di DKI Jakarta, 2014

Kab/Kota	Jumlah Kelurahan	Rumah Sakit Bersalin/ Rumah Bersalin		Poliklinik/ Balai Pengobatan		Puskesmas		Tempat Praktek Dokter	
		Jumlah Kelurahan	Jumlah RSB	Jumlah Kelurahan	Jumlah Poliklinik	Jumlah Kelurahan	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kelurahan	Jumlah Praktek Dokter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kepulauan Seribu	6	1	1	-	-	6	6	1	1
Kota Jakarta Selatan	65	38	80	58	169	64	81	64	513
Kota Jakarta Timur	65	41	84	64	249	63	85	65	607
Kota Jakarta Pusat	44	17	25	37	142	34	43	43	307
Kota Jakarta Barat	56	24	33	47	134	51	73	56	431
Kota Jakarta Utara	31	19	42	30	193	31	50	31	346
DKI JAKARTA	267	140	265	236	887	249	338	260	2.205

Sumber : Podes 2014

Keberadaan puskesmas yang dimiliki kelurahan menurut wilayah kabupaten/kota secara umum ada di hampir semua kelurahan, namun untuk Kota Administrasi Jakarta Pusat keberadaan puskesmas di kelurahan, baru berada di 34 kelurahan (jumlah puskesmas 43). Sedang Kabupaten Kepulauan Seribu di semua kelurahannya sudah memiliki puskesmas (jumlah puskesmas 6). Sementara keberadaan Puskesmas Pembantu (Pustu) untuk semua kelurahan di Provinsi DKI Jakarta belum ada yang memiliki.

Kejadian luar biasa/wabah penyakit juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menanggulangi wabah penyakit yang sedang terjadi/terjangkit akan dilakukan. Pada tahun 2014 berdasarkan hasil Podes 2014 di Provinsi DKI Jakarta tidak terjadi kejadian luar biasa/wabah penyakit di semua kelurahan. Kejadian luar biasa/wabah meliputi muntaber/diare, demam berdarah, campak, malaria, flu burung, hepatitis E, DPT, dan lainnya

Sementara penerima surat keterangan tidak mampu (SKTM) menurut wilayah kabupaten/kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta berada di 252 kelurahan. Terdapat 15 kelurahan yang warganya tidak membuat surat keterangan tidak mampu, yaitu di Kota Administrasi Jakarta Selatan (5 kelurahan) dan di

Kota Administrasi Jakarta Timur (10 kelurahan). Sedangkan kabupaten/kotamadya yang warganya banyak menerima surat keterangan tidak mampu berada di Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu berada di 31 kelurahan ($\pm 9\%$ dari total penduduk Jakarta Utara) sementara Kabupaten Kepulauan Seribu warga pemanfaat surat keterangan tidak mampu terdapat di 6 kelurahan ($\pm 26\%$ terhadap total penduduk Kepulauan Seribu).

<http://jakarta.bps.go.id>

BAB VI. SOSIAL DAN BUDAYA

Sosial dan budaya merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat di suatu wilayah/negara, termasuk di Negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 45 pasal 32. Dalam kehidupan bersosialisasi dan berbudaya antar manusia wajib menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghargai dan menghormati antara yang satu dan yang lainnya. Pada hakekatnya manusia merupakan makhluk pribadi dan makhluk sosial. Makhluk pribadi artinya manusia mempunyai privasi tersendiri dalam menjalankan kehidupannya sedangkan manusia sebagai makhluk sosial diartikan manusia sangat bergantung dengan manusia lainnya dalam hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat akan ditemui keragaman agama, keragaman suku/etnis serta keragaman budaya.

Di Indonesia kehidupan bermasyarakat dengan keanekaragaman agama dan suku/etnis merupakan hal yang lazim. Hasil Podes 2014 di Provinsi DKI Jakarta, penduduk dengan memeluk agama yang berbeda/multi agama umumnya terdapat di semua kelurahan. Namun keadaan yang sedikit berbeda terjadi di Kabupaten Kepulauan Seribu dimana dari 6 kelurahan, 5 kelurahan penduduknya hanya memeluk/menganut satu jenis agama. Sedangkan berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang memiliki keragaman suku/etnis juga merupakan hal lazim yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Hal ini terlihat dari hasil Podes 2014 dimana semua kelurahan warganya hidup berdampingan dengan berbagai suku/etnis.

Berkaitan dengan penduduk yang berkehidupan dengan beragam agama maupun suku/etnis, keberadaan tempat ibadah juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya. Jumlah tempat ibadah di Provinsi DKI Jakarta, masjid sebanyak 3.332 masjid, surau/langgar 6.247 surau, gereja kristen 733 gereja, gereja katolik 163 gereja, 6 kapela, 138 pura, 138 vihara dan 53 klenteng.

Menurut wilayah kabupaten/kotamadya banyaknya kelurahan yang mempunyai tempat ibadah sangat berkaitan dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Pada tabel 6.2 banyaknya masjid dan surau/langgar yang terdapat di semua kelurahan di Propinsi DKI Jakarta jumlahnya sebanding dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut (mayoritas penduduk DKI Jakarta beragama Islam). Jumlah masjid di Provinsi DKI Jakarta berada di 267 kelurahan dengan jumlah 3.332 masjid dan surau/langgar berada di 265 kelurahan dengan jumlah 6.247 surau/langgar.

Tabel 6.1. Banyaknya Kelurahan Menurut Keberadaan Tempat Ibadah dan Wilayah di DKI Jakarta, 2014

Kab/Kota	Masjid		Surau/Langgar		Gereja Kristen		Gereja Katholik	
	Jumlah Kelurahan	Jumlah Masjid (unit)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Surau/Langgar (unit)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Gereja Kristen (unit)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Gereja Khatolik (unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kepulauan Seribu	6	18	5	18	-	-	-	-
Kota Jakarta Selatan	65	750	65	1.357	37	80	12	14
Kota Jakarta Timur	65	973	65	1.922	51	178	21	30
Kota Jakarta Pusat	44	452	43	524	39	136	19	36
Kota Jakarta Barat	56	617	56	1.403	46	164	21	46
Kota Jakarta Utara	31	522	31	1.023	31	175	20	37
DKI JAKARTA	267	3.332	265	6.247	204	733	93	163

Sumber : Podes 2014

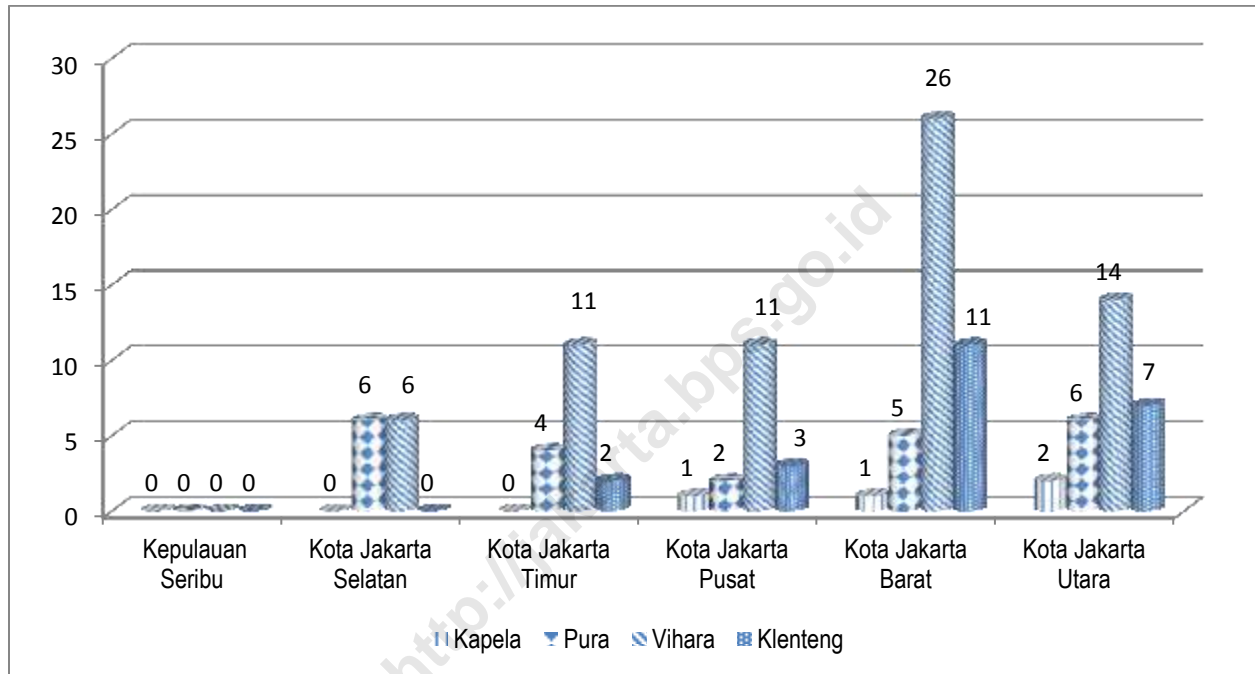
Kota Administrasi Jakarta Timur seluruh kelurahan mempunyai masjid dengan jumlah masjid terbanyak yaitu 973 masjid yang sebanding dengan jumlah penduduknya sebesar 2,8 juta orang (penduduk terbanyak) dan Kabupaten Kepulauan Seribu jumlah masjid 18 dengan penduduk 22,8 ribu orang (penduduk paling sedikit).

Tempat ibadah gereja kristen dan gereja katolik keberadaannya belum dimiliki semua kelurahan. Satu-satunya kota administrasi yang semua kelurahannya sudah memiliki gereja baik gereja kristen dan gereja katolik berada di Kota Administrasi Jakarta Utara, keberadaan gereja kristen berada di 31 kelurahan (jumlah gereja kristen 175) dan gereja katolik berada 20 kelurahan (jumlah gereja katolik 37) sementara Kabupaten Kepulauan Seribu semua kelurahan belum memiliki gereja baik gereja kristen maupun gereja katolik.

Tempat ibadah kapela, pura, vihara dan klenteng keberadaannya banyak terdapat di kelurahan-kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta. Keberadaan kelurahan yang memiliki tempat ibadah kapela, pura, vihara dan klenteng di Kota Administrasi Jakarta Barat untuk kapela berada di 1 kelurahan (1 kapela), Pura berada 5 kelurahan (6 pura), Vihara berada di 26 kelurahan (67

vihara), klenteng berada di 11 kelurahan (21 klenteng). Kota Administrasi Jakarta Utara keberadaan kelurahan yang memiliki tempat ibadah kapela berada di 2 kelurahan (4 kapela), pura berada di 6 kelurahan (26 pura), vihara berada di 14 kelurahan (30 vihara) dan klenteng berada di 7 kelurahan (27 klenteng).

Gambar 6.1. Banyaknya Kelurahan Menurut Tempat Ibadah Kapela, Pura, Vihara, Klenteng dan Wilayah di DKI Jakarta, 2014



Sumber : Podes 2014

Penyandang masalah kecacatan juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah khususnya Kementerian Sosial. Di Provinsi DKI Jakarta keberadaan warga yang memiliki masalah kecacatan berada di 230 kelurahan, lihat tabel 6.2. Penyandang kecacatan dilihat dari jenis kecacatannya meliputi tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna rungu-wicara, tuna daksa, tuna grahita, tuna laras, cacat eks kusta, serta cacat ganda. Kecacatan tuna netra jumlah warga cacat terbanyak berada di Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu 652 orang (berada di 45 kelurahan), disusul Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 236 warga (berada di 36 kelurahan), sementara di Kabupaten Kepulauan Seribu jumlah warga cacat tuna netra yang paling sedikit yaitu 13 orang (di 6 kelurahan).

Tabel 6.2. Banyaknya Kelurahan Menurut Keberadaan Penyandang Cacat, Jenis kecacatan dan Wilayah di DKI Jakarta, 2014

Kab/Kota	Keberadaan Penyandang Cacat (Kelurahan)	Jenis Kecacatan									
		Tuna Netra		Tuna Rungu		Tuna Wicara		Tuna Rungu Wicara		Tuna Daksa	
		Jumlah Kelurahan	Jumlah Tuna Netra (orang)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Tuna Rungu (orang)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Tuna Wicara (orang)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Tuna Rungu Wicara (orang)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Tuna Daksa (orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kepulauan Seribu	6	6	13	4	10	2	4	5	17	5	41
Kota Jakarta Selatan	46	30	134	22	107	12	37	10	32	30	155
Kota Jakarta Timur	62	45	652	36	426	14	54	29	86	44	296
Kota Jakarta Pusat	41	22	67	17	84	14	40	8	19	24	84
Kota Jakarta Barat	45	36	236	21	137	20	52	16	78	32	144
Kota Jakarta Utara	30	25	125	19	116	17	111	26	169	28	249
DKI JAKARTA	230	164	1.227	119	880	79	298	94	401	163	969

Sumber : Podes 2014

Keberadaan warga cacat tuna rungu di Provinsi DKI Jakarta jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan cacat tuna netra yaitu tersebar di 119 kelurahan dengan 880 orang cacat. Warga cacat tuna rungu yang terbanyak juga berada di Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu 426 orang tuna rungu (ada di 36 kelurahan), di urutan kedua Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu 137 orang (berada di 21 kelurahan), dan urutan terakhir berada di Kabupaten Kepulauan Seribu yaitu 10 orang (berada di 4 kelurahan). Di Provinsi DKI Jakarta keberadaan warga cacat tuna wicara jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan cacat tuna rungu yaitu hanya 298 orang yang berada di 79 kelurahan. Warga cacat tuna wicara terbanyak berada di Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu 111 orang tuna wicara, tersebar di 17 kelurahan dan warga cacat tuna wicara paling sedikit berada di Kabupaten Kepulauan Seribu yaitu 4 orang (berada 2 kelurahan).

Jenis cacat tuna rungu-wicara (jenis kecacatan karena kedua panca indranya tidak dapat berfungsi), di Provinsi DKI Jakarta keberadaan warga cacat tuna rungu-wicara yaitu sebanyak 401 orang yang berada di 94 kelurahan. Menurut wilayah kabupaten/kota warga cacat tuna rungu-wicara terbanyak

berada di Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu 139 orang (berada di 26 kelurahan), dan warga cacat tuna rungu-wicara terendah berada di Kabupaten Kepulauan Seribu yaitu 17 orang (berada di 4 kelurahan).

Tuna daksa adalah orang mempunyai kecacatan karena cacat tubuh, cacat fisik, dan cacat ortopedi. Keberadaan penderita tuna daksa banyak terdapat di Kota Administrasi Jakarta Timur, yaitu di 44 kelurahan (296 orang), di Kota Administrasi Jakarta Utara berada di 28 kelurahan (249 orang), di Kota Administrasi Jakarta Selatan berada di 30 kelurahan (155 orang cacat), Kota Administrasi Jakarta Barat berada di 32 kelurahan (144 orang cacat), Kota Administrasi Jakarta Pusat berada di 24 kelurahan (84 orang cacat), dan Kabupaten Kepulauan Seribu berada di 5 kelurahan (41 orang cacat).

Lanjutan Tabel 6.2

Kab/Kota	Keberadaan Penyandang Cacat (Kelurahan)	Jenis Kecacatan							
		Tuna Grahita		Tuna Laras		Cacat Eks Sakit Kusta		Cacat Ganda	
		Jumlah Kelurahan	JumlahTuna Grahita (orang)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Tuna Laras (orang)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Cacat Eks Sakit Kusta (orang)	Jumlah Kelurahan	JumlahCacat Ganda (orang)
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Kepulauan Seribu	6	6	23	3	6	1	2	1	3
Kota Jakarta Selatan	46	26	92	5	11	1	1	6	24
Kota Jakarta Timur	62	32	152	7	22	2	3	20	127
Kota Jakarta Pusat	41	13	54	12	45	3	4	7	12
Kota Jakarta Barat	45	27	109	6	8	2	2	7	31
Kota Jakarta Utara	30	17	149	24	115	10	17	26	229
DKI JAKARTA	230	121	579	57	207	19	29	67	426

Sumber : Podes 2014

Cacat grahita adalah cacat karena kelainan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada mental intelektual sejak bayi/dalam kandungan atau masa bayi dan anak-anak yang disebabkan oleh faktor organik biologis maupun faktor fungsional. Di Provinsi DKI Jakarta warga yang menderita karena cacat grahita sebanyak 579 orang berada di 121 kelurahan. Wilayah kabupaten/kota administasi yang banyak terdapat warga cacat grahita yaitu Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu berada di 32 kelurahan (152 orang

cacat), Kota Administrasi Jakarta Utara berada di 17 kelurahan (149 orang cacat), Kota Administrasi Jakarta Barat berada di 27 kelurahan (109 orang cacat), Kota Administrasi Jakarta Selatan berada di 26 kelurahan (92 orang cacat), Kota Administrasi Jakarta Pusat berada di 13 kelurahan (54 orang cacat) dan Kabupaten Kepulauan Seribu berada di 6 kelurahan (23 orang cacat).

Tuna Laras adalah kecacatan yang disebabkan individunya mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Biasanya orang ini mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan mengalami gangguan emosi. Di Provinsi DKI Jakarta warga yang menderita karena cacat tuna laras sebanyak 207 orang yang berada di 57 kelurahan. Sedangkan menurut wilayah kabupaten/kota penderita tuna laras banyak terdapat di Kota Administrasi Jakarta Utara berada di 24 kelurahan (115 orang cacat) dan yang paling sedikit di Kabupaten Kepulauan Seribu berada di 3 kelurahan (6 orang cacat)

Keberadaan warga karena kecacatan eks penyakit kusta masih ditemui di kelurahan khususnya di Propinsi DKI Jakarta yang keberadaannya di 19 kelurahan (29 orang cacat). Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang paling banyak terdapat penderita kecacatan eks sakit kusta yaitu berada di 10 kelurahan (17 orang cacat) dan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang paling sedikit terdapat penderita kecacatan eks penyakit kusta yaitu berada di 1 kelurahan (1 orang cacat).

Cacat Ganda adalah orang yang memiliki kombinasi kelainan (baik dua jenis kelainan atau lebih), misal cacat karena gangguan pendengaran dan penglihatan, mental dan sosial perilaku. Di provinsi DKI Jakarta keberadaan penderita cacat ganda masih ditemui di 67 kelurahan, yaitu sebanyak 426 orang. Kota Administrasi Jakarta Utara paling banyak terdapat warga yang menderita cacat ganda yaitu lebih dari 50 persennya dari penderita yang ada provinsi, keberadaannya ada di 26 kelurahan (229 orang cacat). Kota Administrasi Jakarta Timur berada di urutan kedua terdapat warga cacat ganda yaitu di 20 kelurahan (127 orang cacat).

BAB VII. HIBURAN DAN OLAH RAGA

Hiburan dan olah raga merupakan suatu kegiatan yang juga diperlukan dalam kehidupan manusia sebagai refreshing/penyeimbang kehidupan dari kegiatan rutinas seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Kehidupan yang keras, perjalanan menuju tempat kerja/sekolah dengan tingkat kemacetan yang tinggi dan sering terjadi, ditambah lagi tanggung jawab atas pekerjaan/sekolah membuat manusianya berada pada tingkat stress yang cukup ditinggi. Menyenangkan diri dengan mengunjungi tempat hiburan dan berolah raga sangat diperlukan untuk menghilangkan/mengurangi stress yang terjadi dalam menjalankan pekerjaan rutin. Untuk memenuhi kebutuhan ini, baik pemerintah maupun pihak swasta menyediakan tempat-tempat hiburan seperti ruang publik terbuka, gedung bioskop, pub/diskotik/karaoke, dan pusat kebugaran, sedangkan untuk melakukan kegiatan olah raga tersedia lapangan sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, futsal dan kolam renang.

Tabel 7.1. Banyaknya Kelurahan Menurut Ketersediaan Tempat Hiburan, Pusat Kebugaran, dan Wilayah di DKI Jakarta, 2014

Kab/Kota	Ruang Publik Terbuka		Gedung Bioskop		Pub/Diskotek/ Karaoke		Pusat Kebugaran	
	Jumlah kelurahan	% Kelurahan	Jumlah kelurahan	% Kelurahan	Jumlah Kelurahan	% Kelurahan	Jumlah Kelurahan	% Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kepulauan Seribu	5	100,0	-	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Selatan	56	86,2	15	23,1	33	50,8	27	41,5
Kota Jakarta Timur	41	63,1	6	9,2	12	18,5	32	49,2
Kota Jakarta Pusat	44	100,0	9	20,5	20	45,5	32	50,0
Kota Jakarta Barat	32	57,1	5	8,9	20	35,7	43	76,8
Kota Jakarta Utara	29	93,5	7	22,6	16	51,6	22	71,0
DKI JAKARTA	208	77,9	42	15,7	101	37,8	146	54,7

Sumber : Podes 2014

a. Hiburan

Ketersediaan ruang publik terbuka di Propinsi DKI Jakarta hanya berada di 208 kelurahan, dimana Kabupaten Kepulauan Seribu (6 kelurahan) dan Kota Administrasi Jakarta Pusat (44 kelurahan) di setiap kelurahannya sudah ada ruang publik terbuka. Sementara Kota Administrasi Jakarta Utara ruang publik terbuka ada di 29 kelurahan, Kota Jakarta Selatan ada di 56 kelurahan, Kota Administrasi Jakarta Timur ada di 41 kelurahan dan Kota Administrasi Jakarta Barat ada 32 kelurahan.

Keberadaan gedung bioskop di kelurahan tidak sebanyak seperti halnya ketersediaan ruang publik terbuka, pub/diskotik/karaoke dan pusat kebugaran. Ketersediaan gedung bioskop di kelurahan jumlahnya sangat terbatas hal ini sebagai akibat dari mahalnya investasi yang harus dikeluarkan dalam pembangunan sebuah gedung bioskop. Jumlah gedung bioskop di Provinsi DKI Jakarta menurut kelurahan hanya berada di 42 kelurahan. Ketersediaan gedung bioskop Kota Administrasi Jakarta Selatan berada di 15 kelurahan, Kota Administrasi Jakarta Pusat berada di 9 kelurahan, Kota Administrasi Jakarta Utara berada di 7 kelurahan, Kota Administrasi Jakarta Timur berada di 6 kelurahan, Kota Administrasi Jakarta Barat berada di 5 kelurahan sementara di Kabupaten Kepulauan Seribu tidak ada kelurahan yang mempunyai gedung bioskop.

Ketersediaan pub/diskotik/karaoke untuk Provinsi DKI Jakarta berada di 101 kelurahan dimana Kota Administrasi Jakarta Selatan berada di 33 kelurahan, Kota Administrasi Jakarta Timur berada di 12 kelurahan, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Barat masing-masing berada di 20 kelurahan dan Kota Administrasi Jakarta Utara berada di 16 kelurahan, sedang untuk Kabupaten Kepulauan Seribu tidak ada kelurahan yang memiliki pub/diskotik/karaoke.

b. Olah Raga

Jumlah kelurahan yang mempunyai ketersediaan pusat kebugaran berada di 146 kelurahan untuk Provinsi DKI Jakarta, sedangkan untuk wilayah kabupaten/kota yang terbanyak memiliki pusat kebugaran berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu berada di 43 kelurahan, Kota Administrasi Jakarta Utara berada di 22 kelurahan, Kota Administrasi Jakarta Pusat berada di 22 kelurahan, Kota Administrasi Jakarta Timur berada di 32 kelurahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan berada di 26 kelurahan dan untuk Kabupaten Kepulauan Seribu tidak ada satu kelurahanpun yang memiliki pusat kebugaran.

Ketersediaan lapangan olah raga merupakan bagian yang penting dalam kehidupan khususnya dalam meningkatkan kebugaran masyarakat. Oleh karena itu tersedianya lapangan olah raga sangat diperlukan untuk aktivitas olah raga. Ketersediaan lapangan sepak bola yang dimiliki kelurahan di Provinsi DKI Jakarta berada di 138 kelurahan (51,7 persen), dimana Kabupaten Kepulauan Seribu semua kelurahannya sudah memiliki lapangan sepak bola yaitu sebesar 100,0 persen (6 kelurahan). Hanya saja Kota Administrasi Jakarta Pusat jumlah kelurahan yang memiliki lapangan sepak bola hanya sebesar 15,7 persen (7 kelurahan). Salah satu penyebab rendahnya ketersediaan lapangan sepak bola di kotamadya disebabkan karena terbatasnya luas lahan untuk sarana publik di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan perekonomian sehingga banyak perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta berdiri di Kota Administrasi Jakarta Pusat sehingga lahan untuk lapangan sepak bola terbatas.

Tabel 7.2. Banyaknya Kelurahan Menurut Ketersediaan Lapangan Olah Raga, Jenis Olah Raga Menurut Wilayah di DKI Jakarta, 2014

Kab/Kota	Sepak Bola		Bola Voli		Bulu Tangkis		Bola Basket		Tenis Lapangan		Futsal		Kolam Renang	
	Jml Kelurahan	% Kelurahan	Jml Kelurahan	% Kelurahan	Jml Kelurahan	% Kelurahan	Jml Kelurahan	% Kelurahan	Jml Kelurahan	% Kelurahan	Jml Kelurahan	% Kelurahan	Jml Kelurahan	% Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kepulauan Seribu	6	100,0	6	100,0	5	83,3	4	66,7	1	16,7	2	33,3	-	-
Kota Jakarta Selatan	35	53,8	54	83,1	59	90,8	40	61,5	36	55,4	33	50,8	15	23,1
Kota Jakarta Timur	44	67,7	64	98,5	65	100,0	57	87,7	44	67,7	47	72,3	14	21,5
Kota Jakarta Pusat	7	15,9	22	50,0	38	86,4	22	50,0	9	20,5	14	31,8	6	13,6
Kota Jakarta Barat	25	44,6	40	71,4	52	92,9	39	69,6	32	57,1	37	66,1	17	30,4
Kota Jakarta Utara	21	67,7	29	93,5	31	100,0	26	83,9	20	64,5	23	74,2	13	41,9
DKI JAKARTA	138	51,7	215	80,5	250	93,6	188	70,4	142	53,2	156	58,4	65	24,3

Sumber : Podes 2014

Keberadaan lapangan bola voli di kelurahan di Provinsi DKI Jakarta berada di 215 kelurahan (80,5 persen). Dimana semua kelurahannya untuk Kabupaten Kepulauan Seribu sudah memiliki lapangan bola voli (100,0 persen), Kota Administrasi Jakarta Timur di urutan kedua berada di 64 kelurahan (98,5 persen), disusul Kota Administrasi Jakarta Utara keberadaan lapangan bola voli berada di 29 kelurahan (93,5

persen), Kota Administrasi Jakarta Selatan berada di 54 kelurahan (83,1 persen), Kota Administrasi Jakarta Barat berada di 40 kelurahan (71,4 persen) dan Kota Administrasi Jakarta Pusat berada di 22 kelurahan (50,0 persen).

Sementara keberadaan lapangan bulu tangkis di kelurahan di Provinsi DKI Jakarta jumlahnya jauh lebih banyak dari lapangan-lapangan olah raga lainnya. Jumlah kelurahan yang memiliki lapangan bulu tangkis sudah berada di 250 kelurahan (90.6 persen), dimana Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Utara semua kelurahannya sudah memiliki lapangan bulu tangkis.

Ketersediaan lapangan bola basket, tenis lapangan, futsal dilihat keberadaannya menurut kelurahan di wilayah kabupaten/kotamadya untuk Kota Administrasi Jakarta Timur dengan jumlah kelurahan terbanyak atas ketersediaan lapangan bola basket, tenis lapangan dan futsal, dimana lapangan bola basket berada di 57 kelurahan (87,7 persen), tenis lapangan berada di 44 kelurahan (67,7 persen), futsal berada di 47 kelurahan (72,3 persen). Di urutan kedua mengenai ketersediaan lapangan-lapangan ini berada di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan ketersediaan lapangan bola basket berada di 26 kelurahan (83,9 persen), tenis lapangan berada di 20 kelurahan (64,5 persen), futsal berada di 23 kelurahan (74,2 persen). Dan selanjutnya Kota Administrasi Jakarta Barat dimana ketersediaan lapangan bola basket berada di 39 kelurahan (69,9 persen), tenis lapangan berada di 32 kelurahan (57,1 persen), lapangan futsal berada di 37 kelurahan (66,1 persen).

Sedangkan untuk ketersediaan kolam renang menurut wilayah kabupaten/kota, Kota Administrasi Jakarta Utara yang memiliki kolam renang dengan jumlah kelurahan terbanyak yaitu berada di 13 kelurahan (41,9 persen), Kota Administrasi Jakarta Barat berada di 17 kelurahan (30,4 persen), Kota Administrasi Jakarta Selatan berada di 15 kelurahan (23,1 persen), Kota Administrasi Jakarta Timur berada di 14 kelurahan (21,5 persen) dan Kota Administrasi Jakarta Pusat berada di 6 kelurahan (13,6 persen).

BAB VIII. ANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI

8.1. Angkutan

Ketersediaan angkutan umum memegang peranan penting dalam proses pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya angkutan umum akan meningkatkan aksesibilitas penduduk dan sumber daya lainnya. Sehingga memberi stimulant ke arah kemajuan pembangunan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya. Demikian juga yang terjadi di DKI Jakarta. Sebagai kota metropolitan, kebutuhan akan angkutan umum di DKI Jakarta cukup tinggi. Mengingat DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, dan menjadi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi, menjadikan penduduk Jakarta mempunyai mobilitas yang cukup tinggi.

Menurut hasil pendataan Potensi Desa Tahun 2014, bahwa seluruh kelurahan di DKI Jakarta telah dilalui oleh angkutan umum. Angkutan umum di DKI Jakarta mempunyai trayek yang tetap dan setiap hari beroperasi. Di Jakarta, angkutan umum beroperasi siang dan malam hari, kecuali untuk kelurahan-kelurahan di Kepulauan Seribu yang hanya beroperasi pada siang hari saja. Hal ini disebabkan di Kepulauan Seribu, angkutan umumnya menggunakan moda transportasi air, yang jadwal keberangkatan hanya pada siang hari saja.

Sebagai pusat pemerintahan, provinsi DKI Jakarta akan selalu menjadi tolok ukur dalam hal pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Salah satu faktor pendukung bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah daerah adalah jarak tempuh dari kantor kelurahan ke kantor kecamatan. Jika semakin dekat jarak antara kantor kelurahan ke kantor kecamatan maka akan semakin mudah dan cepat masyarakat mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah (kelurahan dan kecamatan). Jarak tempuh yang dimaksud disini adalah jarak tempuh dengan menggunakan kendaraan yang umum digunakan oleh warga kelurahan setempat.

Sebagian besar kelurahan di DKI Jakarta mempunyai jarak tempuh dari Kantor Kelurahan ke Kantor Kecamatan kurang dari 5 Kilometer. Namun ada satu kelurahan yang berjarak lebih dari 44 kilometer, yaitu di Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Jarak dari Kantor Lurah Pulau Untung Jawa ke Kantor Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, yang berada di Pulau Tidung adalah sekitar 98 kilometer. Banyaknya Kelurahan di DKI Jakarta menurut Jarak Tempuh dari Kantor Kelurahan ke Kantor Kecamatan dapat dilihat pada table 8.1.

Tabel 8.1. Banyaknya Kelurahan Menurut Jarak Tempuh dari Kantor Kelurahan ke Kantor Kecamatan, 2014

Kabupaten/Kota	Jarak Tempuh (km)					
	0 - 4	5-9	10-14	15 - 19	20 - 24	44 lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	3	1	-	-	1	1
Jakarta Selatan	61	4	-	-	-	-
Jakarta Timur	60	5	-	-	-	-
Jakarta Pusat	44	-	-	-	-	-
Jakarta Barat	46	10	-	-	-	-
Jakarta Utara	24	6	-	1	-	-
DKI Jakarta	238	26	-	1	1	1

Sumber : Podes 2014

Selain jarak tempuh dari kantor kelurahan ke kantor kecamatan, faktor pendukung lainnya adalah jenis angkutan yang digunakan penduduk. Dengan menggunakan angkutan untuk menempuh jarak dari kantor kelurahan ke kantor kecamatan akan semakin cepat, dengan demikian akan mengurangi waktu dalam hal mendapatkan pelayanan pemerintah.

Menurut hasil pendataan potensi desa tahun 2014 bahwa sebagian besar kelurahan di DKI Jakarta penduduknya menggunakan angkutan umum dari kantor kelurahan ke kantor kecamatan. Sedangkan 7 kelurahan menggunakan angkutan lainnya. Yang termasuk angkutan lainnya misalnya jalan kaki. Dari 209 kelurahan yang penduduknya menggunakan angkutan umum untuk menuju kantor kecamatan dari kantor kelurahan, sebanyak 40 kelurahan yang penduduknya menggunakan ojek sepeda motor, 166 kelurahan yang penduduknya menggunakan kendaraan bermotor roda 3 atau lebih, dan 3 kelurahan yang penduduknya menggunakan perahu (baik bermotor maupun tidak). Tiga kelurahan tersebut, semua berada di Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu Pulau Pari, Pulau Jawa, dan Pulau Panggang. Banyaknya Kelurahan Menurut Angkutan yang biasa digunakan penduduk dari kantor kelurahan ke kantor kecamatan dapat dilihat dari table 8.2.

Tabel 8.2. Banyaknya Kelurahan Menurut Angkutan yang biasa digunakan penduduk dari kantor Kelurahan ke kantor Kecamatan, 2014

Kabupaten / Kota	Angkutan yang biasa digunakan			Angkutan Umum utama		
	Angkutan Umum	Kendaraan Pribadi	Lainnya	Ojek Sepeda Motor	Kendaraan bermotor roda 3 atau lebih	Perahu (bermotor maupun tidak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	3	0	3	0	0	3
Jakarta Selatan	47	14	4	9	38	0
Jakarta Timur	31	34	0	1	30	0
Jakarta Pusat	41	3	0	14	27	0
Jakarta Barat	56	0	0	15	41	0
Jakarta Utara	31	0	0	1	30	0
DKI Jakarta	209	51	7	40	166	3

Sumber : Podes 2014

8.2. Komunikasi

Komunikasi informasi dan pembangunan merupakan dua hal yang berkaitan. Bahkan bisa dikatakan bahwa komunikasi dan informasi mempunyai andil yang penting bagi pembangunan. Komunikasi informasi merupakan dasar bagi perubahan sosial suatu wilayah, yang tentu saja perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu untuk mencapai harapan dari pembangunan, alat-alat komunikasi dan informasi haruslah bisa menjangkau semua penduduk.

Hasil Potensi Desa Tahun 2014, bahwa di Kabupaten Kepulauan Seribu tidak tersedia telepon umum koin, telepon umum kartu, dan pelayanan pos keliling. Sedangkan warung telekomunikasi, warung internet, dan kantor pos/pos pembantu tersedia dengan masing-masing ketersediaan sarana satu kelurahan. Sementara di Kota Jakarta Barat dan Kota Jakarta Utara tidak tersedia telepon umum kartu, tetapi sarana komunikasi yang lain telah tersedia. Sedangkan untuk, yaitu Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, dan Kota Jakarta Pusat, masing-masing telah tersedia semua sarana komunikasi. Keberadaan Sarana Komunikasi dapat dilihat pada table 8.3.

Tabel 8.3
Banyaknya Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Komunikasi, 2014

Kabupaten/Kota	Telepon Umum Koin	Telepon Umum Kartu	Wartel	Warnet	Kantor Pos/Pos Pembantu/ Rumah Pos	Pelayanan Pos Keliling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	-	-	1	1	1	-
Jakarta Selatan	7	2	35	65	39	16
Jakarta Timur	36	2	33	65	48	17
Jakarta Pusat	12	1	11	43	27	19
Jakarta Barat	3	-	33	56	41	13
Jakarta Utara	11	-	5	31	31	12
DKI Jakarta	69	5	118	261	187	77

Sumber : Podes 2014

Untuk ketersediaan informasi, pada pendataan potensi desa tahun 2014 digunakan indikator program televisi yang dapat diterima warga. Menurut hasil pendataan Podes 2014, bahwa semua kabupaten dan kota di DKI Jakarta bisa menerima program televisi. Semua kelurahan di 5 kota, warga dapat menerima semua program televisi, baik dari TVRI, TVRI Daerah, TV Swasta, dan TV Luar Negeri. Sedangkan di Kabupaten Kepulauan Seribu, belum semua kelurahan yang warganya bisa menerima program TVRI Daerah dan TV Luar Negeri.

BAB IX. EKONOMI

Salah satu indikator untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan melihat ketersediaan sarana perdagangan. Dengan semakin berkembangnya fasilitas perdagangan akan mendorong berkembangnya kesempatan berusaha di bidang perdagangan. Fasilitas perdagangan kini telah banyak macamnya, selain pasar tradisional, ada juga pasar modern. Kedua pasar tersebut dapat dibedakan dengan jelas, jika pasar tradisional, tempat usahanya berbentuk toko-toko, kios, los bahkan tenda, dan dikelola oleh pedagang kecil, menengah maupun koperasi. Hal yang menonjol dari pasar tradisional adalah cara penjualan dan pembelian yang dilakukan dengan tawar menawar. Sedangkan pasar modern biasanya menjual barang kebutuhan sehari-hari dan sifatnya tahan lama, kenyamanan berbelanja bagi pembeli sangat diutamakan, biasanya para pedagang memasang label harga pada setiap barang. Selain itu, pasar juga dapat dibedakan menjadi, pasar dengan bangunan dan pasar tanpa bangunan. Yang disebut pasar dengan bangunan adalah pasar yang menggunakan bangunan tetap dan memiliki lantai, atap, baik berdinding maupun tidak.

Tabel 9.1. Banyaknya Kelurahan menurut Kelompok Pertokoan dan Pasar, 2014

Kabupaten/Kota	Kelompok Pertokoan	Pasar Dengan Bangunan	Pasar Tanpa Bangunan	Tidak ada Kelompok Pertokoan dan pasar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Seribu	-	-	2	4
Jakarta Selatan	53	32	26	8
Jakarta Timur	57	38	39	3
Jakarta Pusat	36	36	20	-
Jakarta Barat	52	44	39	-
Jakarta Utara	26	24	14	-
DKI Jakarta	224	174	140	15

Sumber : Podes 2014

Menurut hasil pendataan Potensi Desa Tahun 2014, di DKI Jakarta semua kabupaten kota telah mempunyai pasar tanpa bangunan. Untuk pasar dengan bangunan, semua kota telah tersedia, tetapi di Kabupaten Kepulauan Seribu tidak ada. Selain tidak tersedianya fasilitas pasar dengan bangunan, di

Kabupaten Kepulauan Seribu juga tidak tersedia kelompok pertokoan. Sedangkan untuk Provinsi DKI Jakarta, dari total 267 kelurahan, sebanyak 15 yang ada kelompok pertokoan dan pasar, yaitu di Kepulauan Seribu sebanyak 4 kelurahan, Jakarta Selatan 8 kelurahan dan Jakarta Timur 3 kelurahan.

Dengan semakin berkembangnya ekonomi suatu wilayah, maka akan semakin banyak dana yang bisa dihimpun dari masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan perbankan yang bisa menghimpun dana tersebut. Selain untuk menghimpun dana dari masyarakat, perbankan juga mendukung kelancaran mekanisme pembayaran.

Menurut Pendataan Potensi Desa Tahun 2014, terdapat 18 kelurahan di DKI Jakarta tidak mempunyai fasilitas perbankan. Di Kabupaten Kepulauan Seribu dari 6 kelurahan hanya 1 kelurahan saja yang mempunyai fasilitas perbankan, yaitu di Kelurahan Pulau Tidung. Untuk Jakarta Selatan, hanya Kelurahan Manggarai yang tidak mempunyai fasilitas perbankan. Sedangkan Jakarta Timur, ada 7 kelurahan yang tidak mempunyai fasilitas perbankan, yaitu Kelurahan Bambu Apus, Cipayung, Munjul, Pisangan Baru, Pondok Ronggon, Setu dan Utan Kayu Selatan. Sementara di Jakarta Pusat terdapat 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Galur, Kampung Rawa, dan Tanah Tinggi. Di Jakarta Utara, hanya 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Marunda dan Kelurahan Semper Timur.

Tabel 9.2. Banyaknya Kelurahan menurut Keberadaan Bank, 2014

Kabupaten/Kota	Jenis Bank			
	Bank Umum Pemerintah	Bank Umum Swasta	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Tidak ada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Seribu	1			5
Jakarta Selatan	63	54	7	1
Jakarta Timur	58	35	5	7
Jakarta Pusat	40	40	10	3
Jakarta Barat	55	51	2	-
Jakarta Utara	29	22	-	2
DKI Jakarta	246	202	24	18

Sumber : Podes 2014

BAB X. KEAMANAN

DKI Jakarta masih merupakan magnet bagi para pendatang di seluruh Indonesia untuk mengadu nasib. Pekerjaan dan penghasilan yang besar dibanding dengan daerah asalnya merupakan daya tarik utama dari para pendatang umumnya, sehingga mereka berharap dapat meningkatkan taraf kehidupan. Dengan masuknya pendatang dari seluruh wilayah di Indonesia, menjadikan Jakarta memiliki penduduk yang padat dan heterogen. Tingginya arus urbanisasi juga berakibat pada ketidakmampuan Jakarta menyerap tenaga kerja yang tersedia sehingga menyebabkan tingginya pengangguran dan selanjutnya kesenjangan ekonomi.

Dengan semua fenomena tersebut, DKI Jakarta mempunyai potensi konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan (kenyamanan, ketenangan, dan kedamaian masyarakat). Salah satu konflik sosial yang terjadi dapat dilihat dari jumlah perkelahian massal. Perkelahian massal adalah perkelahian yang terjadi secara massal melibatkan banyak pelaku antara lain, antar kelompok masyarakat, antar pelajar, antar suku, atau lainnya. Dari hasil Pendataan Potensi Desa Tahun 2014, dapat dilihat bahwa jumlah perkelahian massal paling banyak terjadi di Kota Jakarta Timur selama setahun terakhir, sedangkan di Kabupaten Kepulauan Seribu tidak terjadi sama sekali. Untuk kelurahan yang mengalami kejadian perkelahian massal dapat dilihat pada Table 10.1

Tabel 10.1 Banyaknya Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal dan Kategori Korban, 2014

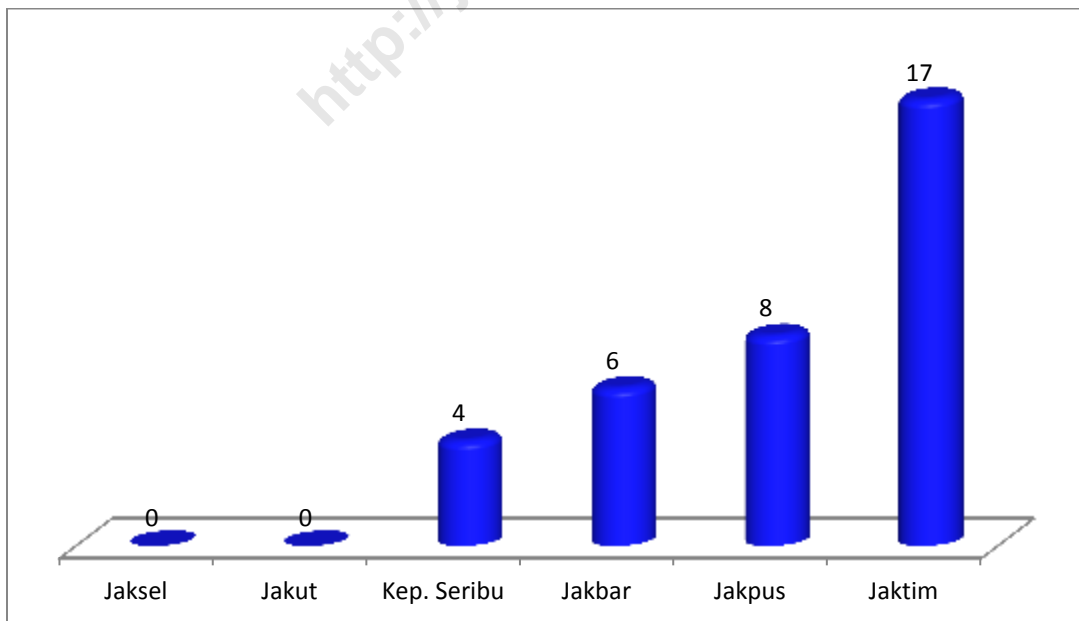
Kabupaten/Kota	Kelurahan yang Mengalami Perkelahian Massal	Jenis Korban	
		Meninggal	Luka-luka
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	-	-	-
Jakarta Selatan	10	-	5
Jakarta Timur	23	1	14
Jakarta Pusat	12	3	7
Jakarta Barat	22	4	15
Jakarta Utara	5	-	3
DKI Jakarta	72	8	44

Sumber : Podes 2014

Korban kejadian perkelahian maasal terbagi menjadi dua, yaitu korban meninggal dunia dan luka-luka. Untuk korban meninggal dunia terjadi di Kelurahan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Di Kota Jakarta Pusat ada tiga kelurahan dengan korban meninggal dunia, yaitu di Kelurahan Cideng, Duri Pulo, dan Kebon Sirih. Sementara di Jakarta Barat, kejadian perkelahian massal sampai menimbulkan korban meninggal terjadi di Kelurahan Angke, Jembatan Besi, Palmerah, dan Tanah Sereal. Sedangkan untuk kejadian perkelahian massal yang menimbulkan korban luka-luka terjadi di 44 kelurahan, yaitu di Jakarta Selatan 5 kelurahan, di Jakarta Timur 14 Kelurahan, di Jakarta Pusat 7 kelurahan, di Jakarta Barat 15 kelurahan, dan di Jakarta Utara 3 kelurahan.

Faktor yang paling penting dalam mempengaruhi keamanan adalah kejadian tindak pidana kejahatan. Menurut pendataan Potensi Desa Tahun 2014, tindak pidana kejahatan selama setahun terakhir terjadi hampir di seluruh kelurahan di DKI Jakarta. Dari 267 kelurahan, hanya 35 kelurahan yang tidak ada kejadian tindak pidana kejahatan selama setahun terakhir. Kelurahan yang tidak terjadi tindak pidana kejahatan dapat dilihat pada gambar 9.1

Gambar 10.1 Kelurahan yang Tidak Terjadi Tindak Kejahatan Selama Setahun Terakhir, 2014



Sumber : Podes 2014

Agar lingkungan aman, maka perlu dijaga keamanan lingkungan. Salah satu instansi yang bertugas untuk menjaga keamanan adalah instansi kepolisian. Untuk memudahkan dalam pengawasan keamanan lingkungan, instansi kepolisian, dalam hal ini Kepolisian Daerah Metro Jaya telah membangun pos polisi. Pos Polisi yang dimaksud adalah perpanjangan tangan dari kepolisian sektor yang berfungsi untuk menjaga kamtibmas wilayah sekitar. Keberadaan pos polisi termasuk pula keberadaan kepolisian sektor (polsek), kepolisian resor (polres), dan kepolisian daerah (polda). Dari hasil pendataan Potensi Desa Tahun 2014 didapatkan bahwa sebanyak 182 kelurahan di DKI Jakarta telah tersedia pos polisi. Ketersediaan pos polisi di setiap kabupaten dan kota dapat dilihat pada tabel 10.2

Tabel 10.2. Banyaknya Kelurahan menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat, 2014

Kabupaten/ Kota	Pos Polisi (tmsk Polsek, Polres, dan Polda)		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi kelurahan yang tidak ada pos polisi)			
	Ada	Tidak Ada	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	3	3	1	2	-	-
Jakarta Selatan	41	24	10	14	-	-
Jakarta Timur	39	26	10	16	-	-
Jakarta Pusat	33	11	5	6	-	-
Jakarta Barat	38	18	14	4	-	-
Jakarta Utara	28	3	2	1	-	-
DKI Jakarta	182	85	42	43	-	-

Sumber : Podes 2014

Terjaganya keamanan lingkungan tidak hanya menjadi tugas dari pihak kepolisian saja, tetapi peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan juga menjadi faktor yang penting. Upaya warga untuk menjaga keamanan lingkungan dapat berupa pembangunan atau pemeliharaan pos keamanan lingkungan (poskamling), pembentukan/pengaturan regu keamanan, penambahan jumlah anggota Hansip/Linmas, pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan, dan lain sebagainya. Upaya-upaya tersebut telah dilakukan oleh warga DKI Jakarta selama setahun terakhir. Menurut Pendataan Potensi Desa Tahun 2014, sebanyak 227 kelurahan telah membangun/memlihara poskamling, 223 kelurahan juga

membentuk/mengatur regu keamanan, 138 kelurahan juga telah menambah jumlah anggota hansip/linmas, 245 kelurahan telah menerapkan pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan, dan 233 kelurahan melakukan upaya lainnya dalam menjaga keamanan lingkungan. Untuk upaya warga menjaga keamanan lingkungan dapat dilihat pada Table 10.3.

Tabel 10.3. Banyaknya Kelurahan menurut Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan Selama Setahun Terakhir, 2014

Kabupaten/Kota	Pembangunan/ pemeliharaan Poskamling	Pembentukan/ pengaturan regu keamanan	Penambahan jumlah anggota hansip/ linmas	Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	4	3	1	5	4
Jakarta Selatan	49	47	16	55	55
Jakarta Timur	61	59	35	61	62
Jakarta Pusat	38	35	23	44	35
Jakarta Barat	46	49	37	49	48
Jakarta Utara	29	30	26	31	29
DKI Jakarta	227	223	138	245	233

Sumber : Podes 2014

BAB XI. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Disini subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau obyek saja.

Pada prinsipnya program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat digunakan untuk :

- a. Pembangunan/perbaikan infrastruktur (sarana/prasarana) lingkungan, meliputi :
 1. Transportasi mencakup infrastruktur transportasi dan pelengkapannya, misalnya jalan, jembatan, dan sebagainya.
 2. Pendidikan mencakup kegiatan pengadaan dan perluasan sarana dan prasarana pendidikan, contoh gedung sekolah dan sarana pendukung.
 3. Permukiman dan kesehatan mencakup perumahan, air bersih, sanitasi dan kegiatan pengadaan gedung, sarana-prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya penerangan jalan, posyandu, dan lain-lain.
 4. Perekonomian mencakup pengadaan sarana prasarana dan penunjang perekonomian, contoh pasar, irigasi, TPI/PPI.
- b. Peningkatan kapasitas perekonomian
 1. Dana bergulir/simpan pinjam mencakup pendanaan dalam bentuk pinjaman secara bergulir untuk modal usaha pertanian/non pertanian.
 2. Dana hibah mencakup pendanaan dalam bentuk pemberian/tanpa pengembalian untuk usaha produktif budidaya maupun non budidaya.
- c. Peningkatan kapasitas sosial kemasyarakatan (SDM).
 1. Peningkatan kapasitas produksi mencakup pelatihan ketrampilan dan penguasaan teknologi untuk memproduksi barang.
 2. Peningkatan ketrampilan pemasaran hasil produksi mencakup pelatihan ketrampilan untuk pemasaran hasil produksi.

3. Penguatan kelembagaan sosial kemasyarakatan mencakup pemberantasan buta aksara, pemberian beasiswa, peningkatan pelayanan pendidikan, penyuluhan ketrampilan usaha, peningkatan wawasan kepedulian, peningkatan kapasitas lainnya.

11.1. Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Jenisnya.

Salah satu contoh program pemberdayaan masyarakat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri, yang meliputi PNPM Mandiri perkotaan dan pedesaan. Program PNPM mandiri ini menggunakan anggaran yang bersumber dari dana pemerintah pusat. Beberapa kelurahan di Provinsi DKI Jakarta juga telah memperoleh manfaat dari PNPM Mandiri perkotaan ini. Selain PNPM Mandiri, di Provinsi DKI Jakarta juga terdapat Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang menggunakan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Pemda DKI Jakarta.

Tabel 11.1. Banyaknya Kelurahan Menurut Keberadaan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Lingkungan Selama 2011-2014 di DKI Jakarta

Kab/Kota	Pembangunan/Perbaikan Intrastruktur Lingkungan			
	Transportasi	Pendidikan	Permukiman dan Kesehatan	Perekonomian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Seribu	3	4	6	0
Jakarta Selatan	47	24	36	2
Jakarta Timur	65	44	57	12
Jakarta Pusat	26	14	19	4
Jakarta Barat	46	13	40	3
Jakarta Utara	26	18	23	10
DKI Jakarta	213	117	181	31

Sumber : Podes 2014

Tabel 11.1. menunjukkan jumlah kelurahan di Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai program/kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait pembangunan/perbaikan infrastruktur, baik transportasi, pendidikan, permukiman dan kesehatan, maupun perekonomian. Dari 267 kelurahan yang ada di DKI Jakarta, kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan/perbaikan infrastruktur transportasi sebanyak 213 kelurahan (79,76 persen), pendidikan sebanyak 117 kelurahan

(43,82 persen), permukiman dan kesehatan sebanyak 181 kelurahan (67,79 persen), dan perekonomian sebanyak 31 kelurahan (11,61 persen).

Selain program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkait pembangunan/perbaikan infrastruktur terdapat juga program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas perekonomian yang berupa dana bergulir/simpan pinjam usaha pertanian,

Tabel 11.2. Banyaknya Kelurahan Menurut Keberadaan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Perekonomian Selama 2011-2014 di Provinsi DKI Jakarta

Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Perekonomian		
	Dana Bergulir/Simpan Pinjam Usaha Pertanian	Dana Bergulir/Simpan Pinjam Usaha Non Pertanian	Dana Hibah Usaha Produktif
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	1	1	0
Jakarta Selatan	2	32	3
Jakarta Timur	6	48	2
Jakarta Pusat	2	8	1
Jakarta Barat	5	27	0
Jakarta Utara	8	21	9
DKI Jakarta	24	137	15

Sumber : Podes 2014

Jumlah kelurahan di Provinsi DKI Jakarta selama tiga tahun terakhir yang terdapat program/kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait peningkatan kapasitas perekonomian terbanyak pada penyaluran dana bergulir atau dana simpan pinjam pada usaha non pertanian yang seluruhnya mencapai lebih dari separoh kelurahan (51,31 persen). Penyaluran dana bergulir atau simpan pinjam untuk usaha pertanian terdapat di 24 kelurahan (8,99 persen). Sedangkan jumlah dana yang berupa hibah usaha produktif hanya terdapat di 15 kelurahan (5,62 persen).

Apabila diperhatikan menurut kabupaten/kota tampak bahwa untuk dana bergulir atau simpan pinjam usaha pertanian paling banyak terdapat di Kota Jakarta Utara (8 kelurahan), disusul oleh Kota Jakarta Timur (6 kelurahan), dan Kota Jakarta Barat (5 kelurahan). Kota Jakarta Selatan dan Kota Jakarta Pusat masing-masing terdapat 2 kelurahan dan Kabupaten Kepulauan Seribu satu kelurahan. Meskipun Provinsi DKI Jakarta merupakan kota metropolitan dan potensi pertaniannya kurang tetapi masih terdapat

rumah tangga yang menggarap lahan sawah dan lahan bukan sawah untuk budidaya pertanian termasuk perikanan. Lahan sawah terutama terdapat di Kota Jakarta Utara dan Jakarta Timur, yang dapat menghasilkan produksi padi dan sayur sayuran.

Dana bergulir/simpan pinjam usaha non pertanian terbanyak di Kota Jakarta Timur sebanyak 48 kelurahan, Jakarta Selatan 32 kelurahan, serta Kota Jakarta Barat 27 kelurahan. Sedangkan kelurahan yang masyarakatnya menerima dana hibah usaha produktif terbanyak di Kota Jakarta Utara sebanyak 9 kelurahan. Program pemberdayaan masyarakat peningkatan kapasitas perekonomian diharapkan dapat lebih mempercepat upaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan modal usaha di sektor pertanian maupun non pertanian serta usaha produktif yang lain.

Tabel 11.3. Banyaknya Kelurahan Menurut Keberadaan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Sosial Masyarakat Selama Tiga Tahun Terakhir di DKI Jakarta, 2014

Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Sosial Masyarakat		
	Ketrampilan Produksi	Ketrampilan Pemasaran	Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	3	2	2
Jakarta Selatan	25	9	19
Jakarta Timur	19	12	33
Jakarta Pusat	10	6	8
Jakarta Barat	5	0	5
Jakarta Utara	0	0	0
DKI Jakarta	62	29	67

Sumber : Podes 2015

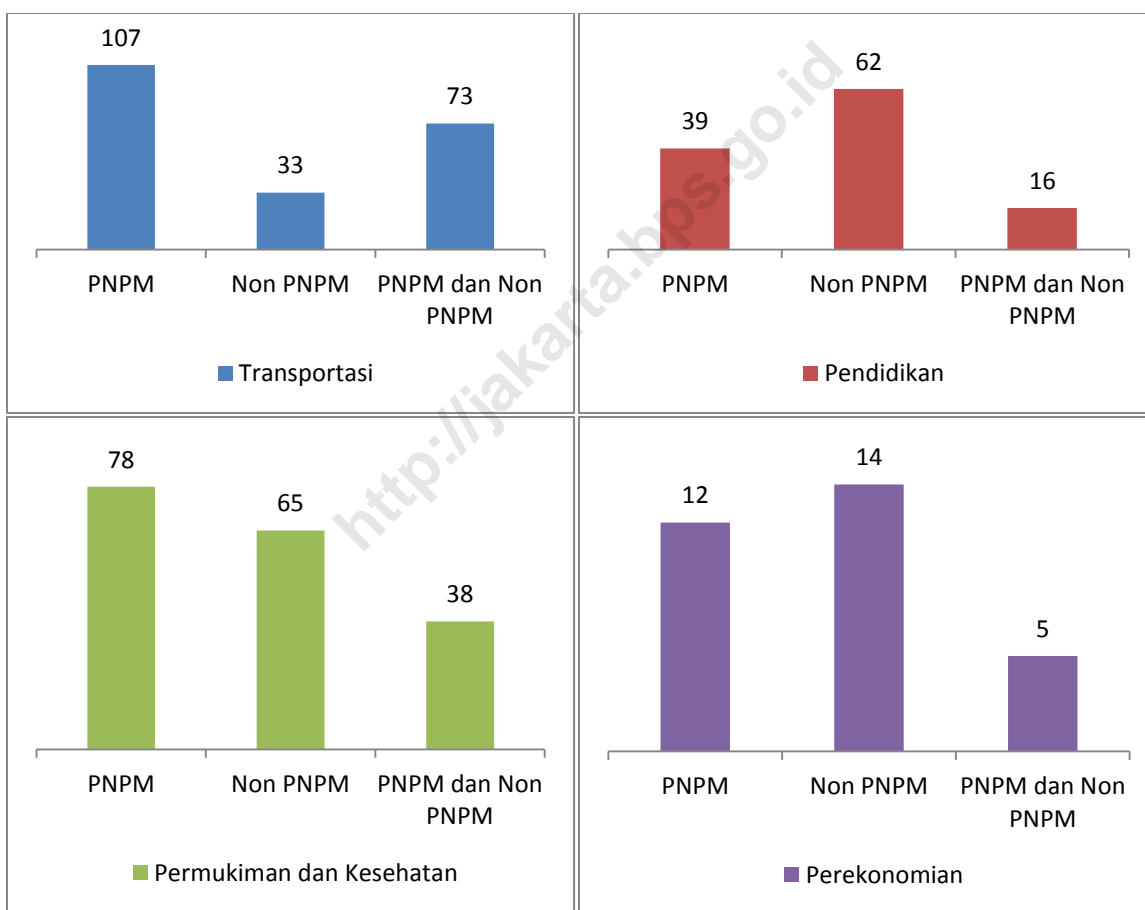
Untuk program/kegiatan pemberdayaan masyarakat peningkatan kapasitas sosial masyarakat dibedakan menjadi pemberian ketrampilan produksi, ketrampilan pemasaran, dan kelembagaan sosial kemasyarakatan. Jumlah kelurahan dengan program peningkatan kapasitas kelembagaan sosial masyarakat mencapai 67 kelurahan dengan jumlah kelurahan tertinggi di Jakarta Timur mencapai 33 kelurahan, sedangkan peningkatan kapasitas ketrampilan produksi terbanyak juga di Jakarta Timur mencapai 12 kelurahan, sementara peningkatan kapasitas ketrampilan produksi terbanyak di Jakarta

Selatan mencapai 25 kelurahan. Program pemberdayaan peningkatan kapasitas ini berupa pelatihan atau penyuluhan kepada warga masyarakat terkait ketrampilan yang akan dikembangkannya.

11.2. Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Sumber Dana Yang Digunakan.

Sumber dana untuk pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berasal dari banyak pihak. Selain bersumber dari dana PNPM, juga dapat berasal dari dana non PNPM, atau gabungan dana PNPM dan non PNPM.

Gambar.11.1. Banyaknya Kelurahan Menurut Sumber Dana Program Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Tahun 2011-2014



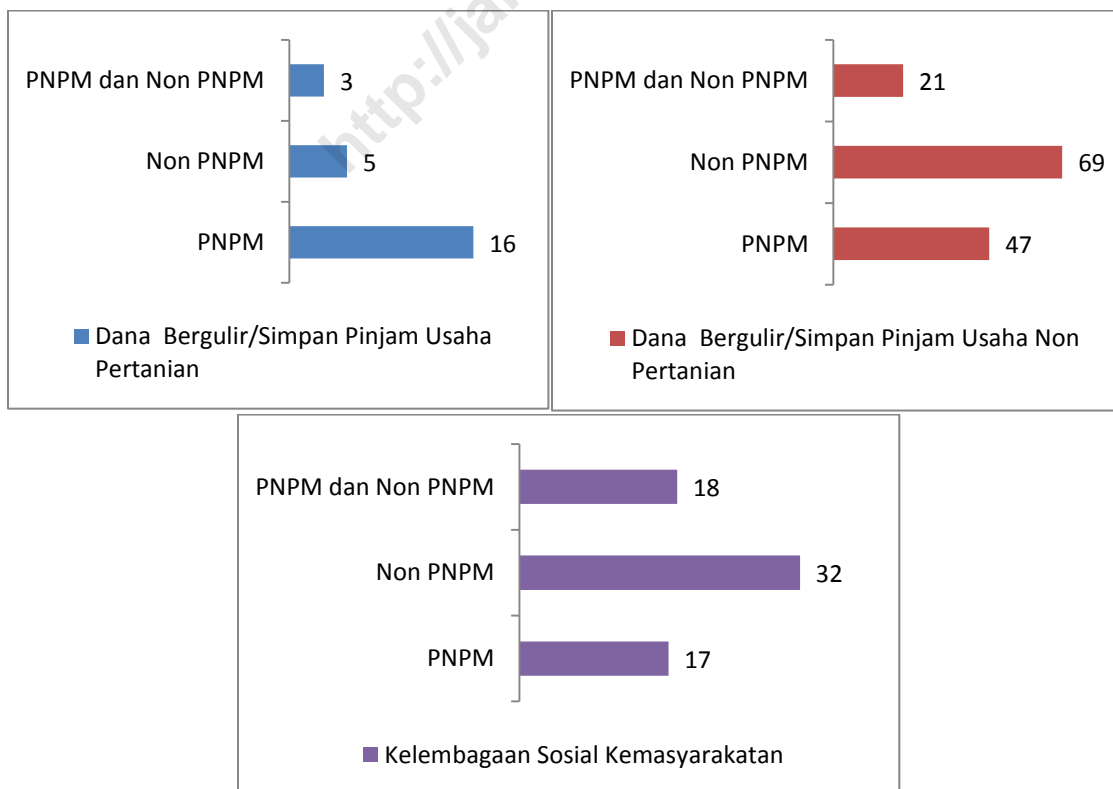
Sumber : Podes 2014

Gambar 11.1 di atas menunjukkan bahwa untuk program pemberdayaan masyarakat terkait pembangunan/perbaikan infrastruktur transportasi sepanjang tahun 2011-2014 terdapat di 213 kelurahan dengan rincian 107 kelurahan (50,23 persen) menerima dari dana PNPM, 33 kelurahan (15,49 persen) dari dana non PNPM, dan sisanya sebanyak 73 kelurahan (34,27 persen) menggunakan dana yang berasal

dari dana gabungan PNPM dan non PNPM. Sementara itu lebih dari separuh (62 kelurahan atau 52,99 persen) kelurahan yang melakukan pembangunan/perbaikan infrastruktur bidang pendidikan menggunakan dana yang berasal dari dana non PMPN, 39 kelurahan (33,33 persen) dana PNPM, dan hanya 16 kelurahan (13,68 persen) yang menggunakan dana gabungan PNPM dan non PNPM. Total kelurahan yang melakukan pembangunan/perbaikan pendidikan seluruhnya mencapai 117 kelurahan.

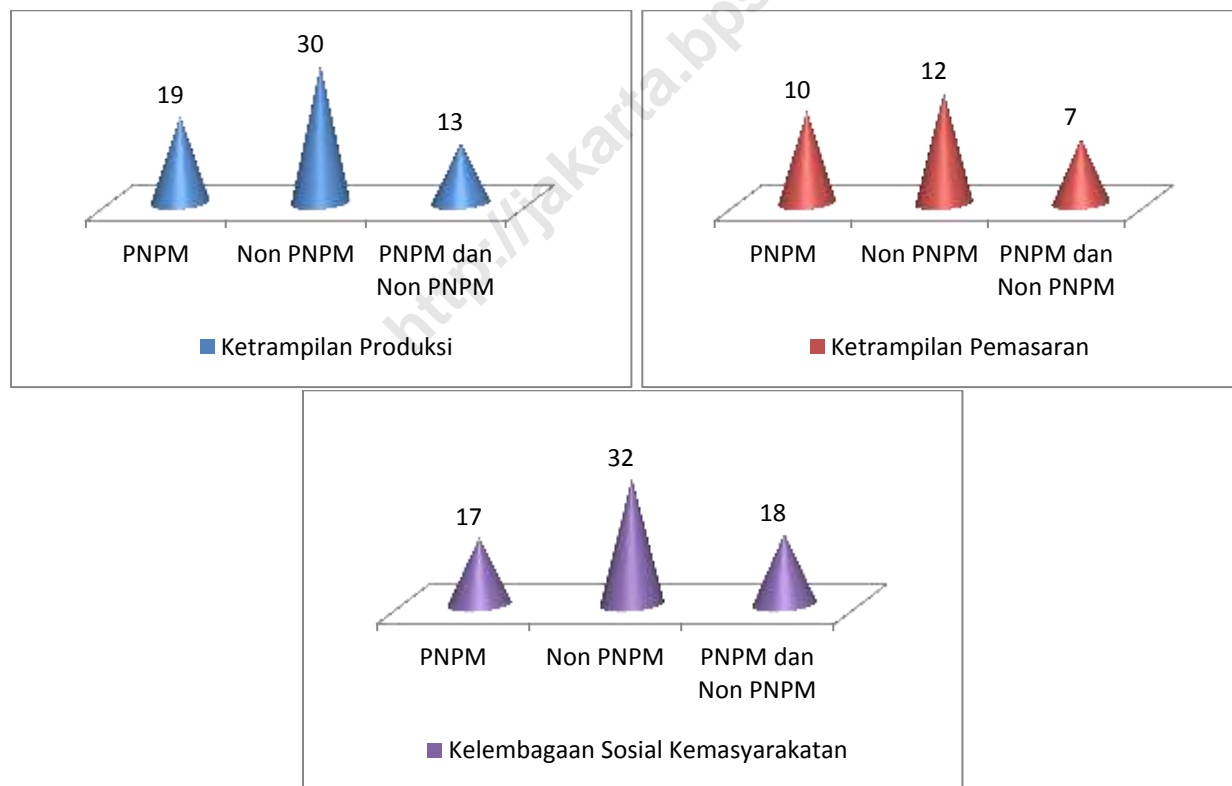
Seperti halnya pembangunan/perbaikan infrastruktur pendidikan, pada pembangunan/ perbaikan infrastruktur permukiman dan kesehatan juga lebih banyak kelurahan yang memperoleh dana yang berasal dari PNPM yang jumlahnya mencapai 78 kelurahan (43,09 persen) dari total 181 kelurahan. Sebanyak 65 kelurahan (35,91 persen) menggunakan dan non PNPM, dan sisanya sebanyak 38 kelurahan (20,99 persen) menggunakan dana gabungan PNPM dan non PNPM. Jumlah kelurahan yang melakukan pembangunan/perbaikan infrastruktur perekonomian relatif sedikit sepanjang tahun 2011-2014, yaitu sebanyak 31 kelurahan dengan rincian 14 kelurahan (45,16 persen) menggunakan dana non PNPM, 12 kelurahan (38,71 persen) dana PNPM, dan sisanya 5 kelurahan (16,13 persen) menggunakan dana gabungan PNPM dan non PNPM.

Gambar 11.2. Banyaknya Kelurahan Menurut Sumber Dana Program Peningkatan Kapasitas Perekonomian Selama Tahun 2011-2014 di Provinsi DKI Jakarta



Pada program/kegiatan pemberdayaan masyarakat peningkatan kapasitas perekonomian tampak bahwa pemberian dana bergulir/simpan pinjam usaha pertanian hanya terjadi di 24 kelurahan sepanjang tahun 2011-2014, meliputi 16 kelurahan (66,67 persen) yang menggunakan dana PNPM, 5 kelurahan (20,83 persen) dana non PNPM, serta sisanya 3 kelurahan (12,50 persen) menggunakan dana gabungan PNPM dan non PNPM. Berbeda dengan sektor pertanian yang relatif kurang potensi di Provinsi DKI Jakarta, pada pemberian dana bergulir/simpan pinjam untuk usaha non pertanian diterima oleh lebih banyak kelurahan sepanjang tahun 2011-2014. Total kelurahan yang memanfaatkan dana ini sebanyak 137 kelurahan dengan rincian 69 kelurahan (50,36 persen) menerima dana yang berasal dari non PNPM, 47 kelurahan (34,31 persen) menerima dana PNPM, dan sisanya 21 kelurahan (15,33 persen) menerima dana gabungan PNPM dan non PNPM. Sementara itu 15 kelurahan yang menerima dana hibah atau usaha produktif sebagian besar (11 kelurahan atau 73,33 persen) berasal dari dana PNPM.

Gambar 11.3. Banyaknya Kelurahan Menurut Sumber Dana Program Peningkatan Kapasitas Sosial Masyarakat Selama Tahun 2011-2014 di Provinsi DKI Jakarta.



Sumber : Podes 2014

Untuk program/kegiatan pemberdayaan masyarakat peningkatan kapasitas sosial masyarakat selama tahun 2011-2014 tampak bahwa kelurahan yang menerima program ketrampilan produksi seluruhnya mencapai 62 kelurahan dengan rincian 30 kelurahan (48,39 persen) menggunakan dana non

PNPM, 19 kelurahan (30,65 persen) dana PNPM, dan sisanya 13 kelurahan (20,97 persen) menggunakan dana gabungan PNPM dan non PNPM.

Pada program peningkatan kapasitas sosial yang berupa ketrampilan pemasaran terdapat di 29 kelurahan dengan rincian 12 kelurahan (41,38 persen) menggunakan dana non PNPM, 10 kelurahan (34,48 persen) menggunakan dana PNPM, dan sisanya 7 kelurahan (24,14 persen) menggunakan dana gabungan PNPM dan non PNPM. Sementara itu jumlah kelurahan yang memperoleh program peningkatan kapasitas sosial kemasyarakatan berupa kelembagaan sosial jumlahnya paling banyak yaitu 67 kelurahan dengan rincian 32 kelurahan (47,76 persen) menggunakan dana non PNPM, 18 kelurahan (26,87 persen) dana gabungan PNPM dan non PNPM, serta sisanya 17 kelurahan (25,37 persen) menggunakan dana PNPM. Kelembagaan sosial yang ada di masyarakat dapat berupa lembaga pendidikan, ekonomi, agama, dan lain sebagainya.

<http://jakarta.bps.go.id>

BAB XII. KETERANGAN PEMERINTAH KELURAHAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya (terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Kepala desa/lurah mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Seluruh kelurahan di Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh kepala kelurahan atau lurah dengan jenis kelamin sebagian besar laki-laki (207 kelurahan atau 77,53 persen). Lurah perempuan hanya terdapat 60 kelurahan (22,47 persen). Proses penempatan PNS DKI Jakarta untuk menduduki jabatan sebagai lurah mengikuti mekanisme seleksi lelang jabatan yang diadakan oleh Pemda DKI Jakarta yang tidak membedakan jenis kelamin tetapi murni berdasarkan kompetensi pegawai yang bersangkutan. Apabila diperhatikan menurut kabupaten/kota tampak bahwa lurah di Kabupaten Kepulauan Seribu seluruhnya berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6 orang. Kemungkinan hal ini terkait kondisi kelurahan di Kabupaten Kepulauan Seribu yang cenderung berupa kumpulan pulau-pulau, sehingga seluruh lurahnya laki-laki.

Jenis kelamin lurah di kota lain tidak jauh berbeda. Di Jakarta Utara dari 31 kelurahan hanya 2 kelurahan (6,45 persen) yang dipimpin oleh lurah perempuan dan 29 kelurahan lainnya (77,53 persen) dipimpin oleh lurah laki-laki. Dari 56 kelurahan yang ada di Kota Jakarta Barat sebanyak 45 kelurahan (80,36 persen) lurah laki-laki dan 20 kelurahan (30,77 persen) lurah perempuan. Di Kota Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan jumlah kelurahan masing-masing 65 kelurahan, mempunyai jumlah kelurahan dengan lurah perempuan sebanyak 20 orang di Jakarta Timur (30,77 persen), lebih banyak dibandingkan dengan di Jakarta Selatan dengan jumlah lurah perempuan 15 orang (23,08 persen). Kota Jakarta Pusat mempunyai kelurahan dengan lurah perempuan sebanyak 12 orang (27,27 persen) dan lurah laki-laki sebanyak 32 orang (72,73 persen) dengan total jumlah kelurahan 44 kelurahan.

Tabel 12.1. Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Lurah dan Sekretaris Lurah di Provinsi DKI Jakarta, 2014

Kabupaten/Kota	Lurah						Sekretaris Kelurahan					
	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kepulauan Seribu	6	100,00	0	-	6	100,00	6	100,00	0	-	6	100,00
Jakarta Selatan	50	76,92	15	23,08	65	100,00	43	71,67	17	28,33	60	100,00
Jakarta Timur	45	69,23	20	30,77	65	100,00	53	81,54	12	18,46	65	100,00
Jakarta Pusat	32	72,73	12	27,27	44	100,00	31	70,45	13	29,55	44	100,00
Jakarta Barat	45	80,36	11	19,64	56	100,00	48	88,89	6	11,11	54	100,00
Jakarta Utara	29	93,55	2	6,45	31	100,00	23	74,19	8	25,81	31	100,00
DKI Jakarta	207	77,53	60	22,47	267	100,00	204	78,46	56	21,54	260	100,00

Sumber : Podes 2014

Berbeda dengan lurah, pada tahun 2014 di Provinsi DKI Jakarta terdapat jabatan sekretaris lurah yang kosong sebanyak 7 kelurahan, yaitu Kota Jakarta Selatan sebanyak 5 kelurahan dan Kota Jakarta Barat sebanyak 2 kelurahan sehingga total sekretaris lurah hanya sebanyak 260 orang. Jika jumlah lurah perempuan pada tahun 2014 sebanyak 60 orang, jumlah sekretaris lurah perempuan tidak berbeda jauh yaitu sebanyak 56 orang, atau hanya 21,54 persen dari total sekretaris lurah. Kota dengan komposisi sekretaris lurah perempuan terbanyak di Jakarta Pusat, dari 44 kelurahan terdapat 13 kelurahan (29,55 persen) sekretaris lurah wanita dan 31 kelurahan (70,45 persen) sekretaris lurah laki-laki. Kabupaten Kepulauan Seribu seluruh sekretaris lurahnya berjenis kelamin laki-laki seperti halnya kepala kelurahannya.

<http://jakarta.bps.go.id>

Tabel 12.2. Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Lurah dan Sekretaris Lurah di Provinsi DKI Jakarta, 2014

Kabupaten/Kota	Lurah					Sekretaris Kelurahan				
	25-34	35-44	45-54	55+	Jumlah	25-34	35-44	45-54	55+	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kepulauan Seribu	1	1	4	0	6	2	0	4	0	6
Jakarta Selatan	4	25	32	4	65	7	10	39	4	60
Jakarta Timur	3	22	40	0	65	2	11	48	4	65
Jakarta Pusat	2	16	24	2	44	5	10	26	3	44
Jakarta Barat	2	15	35	4	56	5	13	35	1	54
Jakarta Utara	1	9	19	2	31	4	10	15	2	31
DKI Jakarta	13	88	154	12	267	25	54	167	14	260

Sumber : Podes 2014

DAFTAR PUSTAKA

Listrik.

[http://www.academia.edu/9025782/jurnal-pembangkit listrik ditinjau dari kondisi sosial ekonomi](http://www.academia.edu/9025782/jurnal-pembangkit_listrik_ditinjau_dari_kondisi_sosial_ekonomi)

<http://ekbis.sindonews.com/read/911389/34/beban-listrik-dki-semakin-besar-1413283098>

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150407111900-20-44714/kepulauan-seribu-kurang-listrik-ahok-mana-pln/>

<http://disperindgi.jakarta.go.id/dki-butuh-tambahan-daya-listrik/>

konversi bbm

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123253-6123-Analisa%20jumlah-Analisis.pdf>

sampah

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20304126-S42110-Yudithia.pdf>

<http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/07/12055328/Pengelolaan.Sampah.Jakarta>

situ/sungai

http://bplhd.jakarta.go.id/slhd2012/Docs/Lap_SLHD/Lap_2C.htm

esmakurosaki12.blogspot.co.id/2013/04/definis-permasalahan-dan-karakteristik.html

<https://bebasbanjir2025.wordpress.com/konsep-pemerintah/pem-prov-dki-jakarta-2/>

waduk

http://bplhd.jakarta.go.id/status_dashboard/detail/id/8

pencemaran air

<http://www.kelair.bppt.go.id/Publikasi/BukuAirLimbahDomestikDKI/BAB1MASALAH.pdf>

http://bplhd.jakarta.go.id/SLHD2013/Docs/Lap_SLHD/Lap_2C.htm

<http://bpbd.jakarta.go.id/news/detail/698>

bencana alam

http://bpbid.jakarta.go.id/assets/attachment/study/RPB_DKI_Jakarta_Final.pdf

Wilayah tepi laut

<http://selatan.jakarta.go.id/v5/%3Fpage%3DGeografi>

<http://pengertian-definisi.blogspot.co.id/2011/11/manfaat-dan-fungsi-hutan-mangrove-untuk.html>

http://ppejawa.com/12_dki_jakarta.html

<https://jurnalbumi.com/hutan-kota-di-jakarta/>

<http://jakarta.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DKI JAKARTA
Jl Salemba Tengah No. 36-38 Paseban Senen
Jakarta Pusat 10440
Telp: +62 21 31928493, Fax: +62 21 3152004
e-mail: bps3100@bps.go.id
website: <http://jakarta.bps.go.id>